

**PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH SERTA PERBANDINGAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Dwi Lestari Andarini

NIM : 992114107

NIRM : 990051121303120107



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2004**

Skripsi
PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH SERTA PERBANDINGAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Oleh:

Dwi Lestari Andarini

NIM : 992114107

NIRM : 990051121303120107

Telah disetujui oleh

Pembimbing I

Tanggal: 19 April 2004



Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si.

Pembimbing II

Tanggal: 12 Juli 2004



Ir. Drs. Hansiadi Y. Hartanto, M.Si., Ak.

Skripsi
PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH SERTA PERBANDINGAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

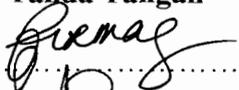
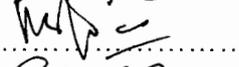
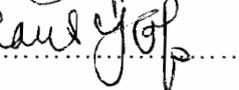
Dwi Lestari Andarini

NIM : 992114107

NIRM : 990051121303120107

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 4 September 2004
dan dinyatakan memenuhi syarat

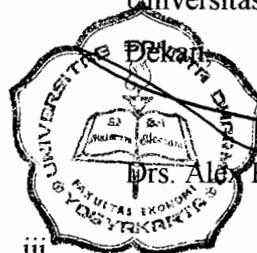
Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua : Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si.	
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E, M.Si., Akt.	
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si.	
Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	
Anggota : Ir. Drs. Hansiadi Y. Hartanto, M.Si., Ak.	

Yogyakarta, 31 Agustus 2004

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan”

(Amsal 1 : 7a)

“Bukan masa depan yang harus kita persiapkan sebab masa depan itu sudah pasti ada, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana membuat masa depan itu berkualitas”

(24 Agustus 2004, 06.30)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

♣ Kekasih terbaik di mata dan hatiku, Teman curhat eksklusif. . .

Jesus Christ.

♣ Yang tercinta Bapak dan Ibu Supradjo.

♣ Mbak Retno, Mas Jin, serta D'Echi yang selalu memberi dukungan kepada saya.

Dwi Lestari Andarini

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang telah saya tulis ini tidak memuat atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dengan kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 24 September 2004

Penulis



Dwi Lestari Andarini

ABSTRAK

PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SERTA PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta

Oleh:

Dwi Lestari Andarini

992114107

Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peranan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan selama Otonomi Daerah, (2) mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Otonomi Daerah dengan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan selama Otonomi Daerah, (3) mengetahui apakah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman berjalan efektif dan efisien sebelum dan selama Otonomi Daerah

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi (peranan) PBB terhadap Pendapatan Daerah, menguji perbedaan pendapatan PBB sebelum dan selama Otonomi Daerah, serta menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) PBB memberikan kontribusi yang sangat kecil dengan rata-rata sebesar 6,69% sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah, dan rata-rata sebesar 4,06% selama 3 tahun pelaksanaan Otonomi Daerah. Sehingga secara umum dapat dikatakan pemungutan PBB belum dapat diandalkan sebagai sumber Pendapatan Daerah, (2) ada perbedaan signifikan antara penerimaan PBB sebelum Otonomi Daerah dengan penerimaan PBB selama Otonomi Daerah, (3) pelaksanaan pemungutan PBB sebelum Otonomi Daerah cukup efisien dengan rata-rata efisiensi sebesar 2,74%; sedangkan pelaksanaan pemungutan PBB selama Otonomi Daerah juga efisien dengan rata-rata efisiensi sebesar 2,76%. Untuk efektivitas pemungutan PBB di Kabupaten Sleman sebelum Otonomi Daerah dapat dikatakan berjalan dengan efektif, sedangkan selama Otonomi Daerah pemungutan PBB dapat berjalan lebih efektif.

ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF THE PROPERTY TAX (PBB) TOWARD THE LOCAL GOVERNMENT INCOME AND THE COMPARISSON OF ITS REVENUE BEFORE AND DURING THE DECENTRALIZATION

A Case Study at Sleman Regency Government

By:

Dwi Lestari Andarini

992114107

Sanata Dharma University

The objectives of this research were: (1) to find out the influence of the property tax toward the income of the local government before and during the decentralization, (2) to find out whether there were any significant differences between the income of property tax before and during the decentralization, (3) to find out whether the property tax collecting in Sleman regency run effectively and efficiently before and during the decentralization.

The data gathering techniques were: interview, documentation, and observation. While the applied data analyzing technique was quantitative data analysis technique. The quantitative analysis was applied in order to calculate the amount of the property tax contribution toward the local government income, to test the differences of the property tax income before and during the decentralization, and to calculate the effectiveness and efficiency of the property tax.

The result of the research showed that: (1) The property tax contributed a very little income toward the local government income in the average of 6.69% before the the decentralization and 4.06% during the the decentralization. Therefore, generally it implied that property tax collecting could not be relied as the source of the local government income, (2) There was a significant difference between the property tax income before and during the the decentralization, (3) the implementation of the tax collecting before the the decentralization was efficient enough in the rate of 2.74%, while the implementation of the property tax collecting during the the decentralization was also efficient in the rate of 2.76%. For the effectiveness of the property tax collecting, it could be said that the property tax collecting in Sleman regency before the the decentralization had run effectively. While the property tax collecting in Sleman regency during the the decentralization had run more effectively.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SERTA PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH”** ini dengan baik. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Sanata Dharma pada Program Studi Akuntansi.

Selama penulisan skripsi ini penulis telah memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Firma Sulistiyowati, S.E, MSi selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi banyak masukan dan bimbingan.
3. Ir. Drs. Hansiadi Y.Hartanto., MSi., Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi saran dan perbaikan.
4. A.Diksa Kuntara,S.E yang telah memberikan saran dan kritikan, serta perbaikan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah membagi ilmu, menunjukkan teori-teori, dan membimbing perkuliahan.

6. Seluruh staf Sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah mempersiapkan semua kebutuhan surat menyurat dan ijin penelitian.
7. Segenap pegawai dan staf Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Syafrudin di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bagian PBB yang telah banyak memberi bantuan dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Suprodjo, mbak Retno dan mas Iin serta D'Echi, yang telah memberi dorongan baik moral maupun spiritual, penghiburan, dan kasih sayang yang tercurah selalu.
10. Simbah putri yang selalu bertanya “kapan lulus?”. *Pangestune sedaya lancar.*
11. Keluarga besar Prodjo Darsono dan Suromihardjo, terimakasih untuk pengharapan yang tiada henti.
12. F.A Anggoro Krismawanto, Si Manusia Berhati Baik, terimakasih untuk semua kesempatan yang selalu diberikan untukku.
13. Teman-temanku di Gk IA: Nana dan Jerry, Desy “Cucumi” dan Dios, Lina “Khumir Kucing” dan Awan “Kintoun”, Vika-Pika Kuro, Summysemoxabis, Suceng, D’ Ima, Ina Daranista dengan Glensy dan Legolas, Nina dan Desi, terimakasih telah memberi warna dalam kehidupanku. Maaf sering merepotkan!
14. Teman-temanku di Kos Micky, Nologaten. *Say to me: “..welcome to the club!”*. Terimakasih buat pencerahan jiwanya, serta semua waktu yang dilewati tanpa kesedihan.

15. Ucup-ku tercinta, terimakasih untuk kesetiaannya menemaniku kemanapun aku ingin. Aku tidak akan pernah rela *Alien* menyentuhmu lagi.
16. Teman-temanku Akuntansi B '99: Erin (selalu membuatku merasa cantik), Anri, Dwi, Mitha, Prita, Siska, Markus, Black, Kenthus, Samson, Sigit Ari, Adi Sronggot, Wahyu "kelas D", Ade "the Lucifer" (*Beware: Don Juan De Marco is back!!*), Yoga (*soulmate* skripsiku) ...*matur nuwun* buat segalanya. Tak ketinggalan Ipank: Sukses terus, ya... Indra "Jingga" Wibawa (Terimakasih telah mengenalkan aku dengan "Kejujuran")
17. Teman-temanku KKN di Bakalan, Cangkringan: Deddy, Agung "Badrun", Onel, Toyo, Arum, Anik, Rien, terimakasih untuk pelajaran hidup bermasyarakat.
18. Teman-temanku di Paingan: Indruk (trimakasih menyelamatkanku dari virus-virus terkutuk), Toni (terimakasih untuk penghitungan SPSS-nya), Edi, Gogon, Jongos, Aris, Milo "alias Molly" yang tidak pernah sembuh nakalnya (maaf, kamu memang harus pergi), dan masih banyak lagi terimakasih atas tempat dan waktunya dalam kebersamaan.

Seluruh pihak yang tidak mungkin kusebut satu persatu karena keterbatasan tempat, semua yang kurasakan terhadap kalian lebih penting dari apapun yang kalian lakukan untukku. Dengan penuh kerendahan hati Penulis tetap menerima saran dan kritikan yang membangun.

Yogyakarta, 24 September 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri.....	7
B. Pajak	11
C. Pajak Bumi dan Bangunan.....	19



BAB III. METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Subyek dan Obyek Penelitian	29
D. Data Yang Dicari	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisa Data	30

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Lokasi dan Luas Wilayah	38
B. Penduduk	41
C. Pendidikan	42
D. Mata Pencaharian	43
E. Agama dan Kepercayaan	43
F. Sleman Sebagai Proyek Percontohan Otonomi Daerah	44
G. Logo “Sleman Sembada”	46

BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman	48
B. Uji Hipotesa Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Otonomi Daerah dan Sesudah Otonomi Daerah	56
C. Analisa Efisiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan	59

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Keterbatasan Penelitian	73
C. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
5.1. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000	49
5.2. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 – 2002	53
5.3. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Selama Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000 dan Tahun Anggaran 2000 – 2002	56
5.4. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000	60
5.5. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 – 2002	63
5.6. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000	66
5.7. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 – 2002	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional diartikan sebagai suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual (Waluyo & Wirawan, 2000;2). Pembangunan nasional membutuhkan serangkaian investasi yang tidak terlepas dari penyediaan dana yang cukup besar sebagai dasar pembiayaan.

Pajak merupakan tumpuan dalam pembiayaan pembangunan nasional, maka pajak juga merupakan tumpuan pembangunan daerah. Hal ini selaras dengan ketentuan pembangunan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menekankan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah, khususnya Pemerintahan Daerah diupayakan untuk terus ditingkatkan sebab di saat pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mandiri dan tidak tergantung pada Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah diyakini mampu memberikan manfaat positif guna tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan daerah sebagai berikut (C Krustanto, 2003) :

- a Bahwa Otonomi Daerah yang demokratis menjamin terciptanya efektifitas pemenuhan aspirasi dari kebutuhan masyarakat lokal daripada program pembangunan yang sentralistik. (Hiram S, Phili : 1963)
- b Dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta proaktif kelompok-kelompok masyarakat dapat terlaksana secara efektif (Rodnelli, 1983)
- c Dengan Desentralisasi yang berwujud Otonomi Daerah, akses masyarakat terhadap kewenangan administrasi pemerintah menjadi semakin dekat dan terbuka (DR Mello, 1981)
- d Dengan Desentralisasi, komitmen masyarakat untuk merubah sikap dan perilaku sosial, ekonomi dan politik dapat dioptimalkan. Karena pada dasarnya mereka sendirilah yang merencanakan, melaksanakan mengendalikan pembangunan dengan fasilitas dari Pemerintah Daerah (Conyers, 1981)

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999, Otonomi Daerah didefinisikan sebagai berikut :

Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Daerah Otonom adalah :

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implikasi dari lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tersebut adalah terjadinya perubahan Pembagian Kewenangan dan Perimbangan Keuangan. Ada tiga hal yang dirasakan oleh daerah yaitu (C Krustanto, 2003) :

1. Perubahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam
2. Perubahan kewenangan pengelolaan sumber-sumber keuangan (pajak, retribusi)
3. Perubahan alokasi anggaran dari pusat ke daerah

Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat fakta-fakta yang ada bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah, dan juga pembiayaan pembangunan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga mendorong Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatannya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah serta Perbandingan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Selama Otonomi Daerah.

B. Permasalahan

1. Bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan selama Otonomi Daerah ?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Otonomi Daerah dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama Otonomi Daerah ?

3. Apakah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan efektif dan efisien terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan selama Otonomi Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan selama Otonomi Daerah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman sebelum Otonomi Daerah dan selama Otonomi Daerah untuk tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2003.
3. Untuk mengetahui apakah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan efektif dan efisien bagi peningkatan pendapatan daerah sebelum dan selama Otonomi Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin meninjau lagi masalah-masalah yang relevan dengan topik ini.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai hasil penerapan teori, khususnya mengenai Akuntansi Perpajakan dan sebagai bekal pengetahuan bagi penulis apabila akan mengembangkan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengelola Keuangan Daerah dan mencari upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka yang dapat dijadikan dasar untuk mengolah data-data tentang peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Bab IV berisi tentang data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai keadaan geografinya, penduduk dan budayanya.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab V membahas analisis data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode dan teknik yang telah diuraikan pada bagian Metodologi Penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab VI berisi kesimpulan dari seluruh langkah proses pembahasan dan analisa data hasil penelitian serta berisi beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri

1. Menurut APBN

Dalam APBN, penerimaan negara dibedakan menjadi :

a. Penerimaan perpajakan

1). Penerimaan dalam negeri

- Pajak penghasilan (pajak minyak dan gas, dan non minyak dan gas)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Cukai
- Pajak lainnya

2). Pajak perdagangan internasional

- Bea masuk
- Pajak/ pungutan ekspor

b. Penerimaan Bukan Pajak

1) Penerimaan sumber daya alam

- Sumber daya alam minyak dan gas
- Sumber daya alam minyak dan gas lainnya

2) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

3) Penerimaan bukan pajak lainnya

2. Sumber Penerimaan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Hasil Pajak Daerah

Undang-undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 tahun 2000 menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memungut apa yang disebut Pajak Daerah. Pajak Daerah ini terdiri dari :

a) Pajak Daerah untuk Pemerintah Kota, terbagi atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan atas Air
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di atas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b) Pajak Daerah untuk Pemerintah Kabupaten, terbagi atas :

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak penerangan jalan
- Pajak reklame

- Pajak hiburan
- Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah Daerah dimana kita dapat melihat secara langsung adanya hubungan antara balas jasa yang diterima karena adanya pembayaran retribusi tersebut.

3) Hasil perusahaan milik daerah dan penghasilan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Perusahaan milik daerah adalah penerimaan yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana perimbangan, terdiri dari (Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999, Bab VIII psl 80) :

1) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam.

Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.

Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20% (duapuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.

Penerimaan negara dari sumber daya alam dibagi dengan imbalan 20% (duapuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan bagian pemerintah dari pendapatan sumber daya alam adalah bagian daerah dari penerimaan Negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan, dan perikanan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana ini ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana ini dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai keputusan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya.

d. Lain-lain penerimaan sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. (Undang-Undang Pemerintah Daerah, 1999; 172).

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Leroy Beaulieu (Judisseno, 1997; 13) dalam bukunya yang berjudul *Traite de la science des Finance*, 1906 mengatakan :

Pajak merupakan kontribusi langsung maupun tak langsung yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan negara.

Dari beberapa definisi pajak yang ada, Dr. Mardiasmo, MBA, Ak dalam bukunya *Perpajakan* menyimpulkan beberapa unsur pajak, antara lain :

a. Iuran dari rakyat kepada kas negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara lain yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Adanya ciri-ciri pajak yang melekat pada pajak, kita dapat melihat 2 fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo, 2003;1) :

- a. Fungsi penerimaan (*budgetaire*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Contoh : pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
 - b. Fungsi mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras.
3. Syarat Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2003:2)
 - a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang pelaksanaan pemungutan harus adil.

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengadakan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
 - b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Artinya pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai contoh adalah tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif yaitu 10%.

4. Pengelompokan Pajak (Mardiasmo, 2003;5)

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Pajak tak langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

1) Pajak subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan .

2) Pajak obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PPN, PBB, PPN BM, dan Bea Meterai.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah.

Contoh :

- Pajak Pemerintah Kota seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Pemerintah Kabupaten seperti Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2003;6):

a. Stelsel Pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Stelsel nyata merupakan stelsel yang pengenaan pajaknya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun takwim (periode) setelah mengetahui besarnya penghasilan yang diperoleh.

2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Stelsel anggapan merupakan stelsel yang pemungutan pajaknya dapat dilakukan pada awal tahun, sebab diatur oleh undang-undang sehingga perhitungan pajaknya dianggap sama dengan penghasilan tahun lalu.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan dimana pemungutan pajak pada awal tahun perhitungannya dengan menggunakan stelsel anggapan dan pada akhir tahun didasarkan pada kenyataan besarnya pendapatan.

b Asas Pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003; 7):

1) Asas tempat tinggal

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri (pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan).

2) Asas sumber

Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3) Asas kebangsaan

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2003; 7) :

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Cirinya adalah sebagai berikut :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada di tangan fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciriya adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciriya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan wajib pajak).

6. Tarif Pajak (Waluyo & Wirawan, 2000; 11)

a. Tarif pajak proporsional (sebanding)

Tarif pajak proporsional adalah tarif berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

b. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Misalnya tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia yaitu :

- 1) Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tarifnya 10%
- 2) Diatas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tarifnya 15%
- 3) Diatas Rp 50.000.000,00 tarifnya 30%

Memperhatikan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

- 1) Tarif progresif, dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap, kenaikan persentasenya tetap
- 3) Tarif progresif regresif, kenaikan persentasenya semakin kecil

c. Tarif regresif

Tarif pajak regresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif pajak tetap

Dalam tarif pajak tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak terutang tetap.

C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo, 2003; 269).

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah (Undang-undang No. 12 tahun 1994):

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- b. Jalan tol,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olahraga,

- f. Galangan kapal, dermaga,
 - g. Taman mewah,
 - h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
 - i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2003;269):
- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
 - b. Adanya kepastian hukum.
 - c. Mudah dimengerti dan adil
 - d. Menghindari pajak berganda.
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2003;273):
- Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2003;270):
- 1) Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan.
 - 2) Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak terutang.

4. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2003; 271):
 - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
 - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu,
 - c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik,
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

5. Pendaftaran

Subjek Wajib Pajak mendaftarkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang dan menyerahkan kembali selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima. Atas dasar SPOP tersebut Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

6. Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak Terutang

Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu pengertian Nilai Jual Objek Pajak terutang (NJOP). Pengertian NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau NJOP Pengganti (Undang-undang No. 12 tahun 1994).

Besarnya NJOP tersebut digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar penentuan Pajak Bumi dan Bangunan seperti tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-16/PJ6/1998 tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pasal 2, 3 dan 4, yaitu :

Pasal 2 : Besarnya NJOP atas Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan ditentukan sebagai berikut :

- a Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar NJOP sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1, yaitu bahwa NJOP berupa tanah adalah sebesar nilai konvensional setiap zona Nilai Tanah kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998.

- b Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOP sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1, yaitu NJOP berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedlam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998.

Pasal 3 :

1. Besarnya NJOP atas Objek Pajak Sektor Perkebunan ditentukan sebagai berikut :
 - a Areal kebun adalah sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan Jumlah Investasi Tanaman Perkebunan sesuai ddengan Standar Investasi menurut umur tanaman.
 - b Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan, adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
 - c Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15.
2. Penggolongan Wilayah, Jenis Perkebunan dan Besarnya Standar Investasi Tanaman Perkebunan adalah sebagaimana dicantumkan pada lampiran 1 Keputusan Dirjen Pajak.

Pasal 4: Besarnya NJOP atas Objek Pajak sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri ditentukan sebagai berikut :

- a Areal Produktif sebesar 8,5 x Hasil Bersih setahun sebelum pajak berjalan.
- b Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
- c Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOP seperti yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998.

Adapun besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 :

- a Objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP.
- b Objek pajak lainnya :
 - 1) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.
 - 2) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP apabila Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan terutang :

$$\begin{aligned} \text{PBB terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \% \text{ NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

NJKP adalah Nilai Jual Kena Pajak, yaitu suatu persentase tertentu yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP. Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan PBB, NJKP sebesar 40% (empat puluh persen) ditetapkan untuk objek pajak perkebunan, kehutanan dan perkotaan dengan NJOP Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.(Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002)

7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.

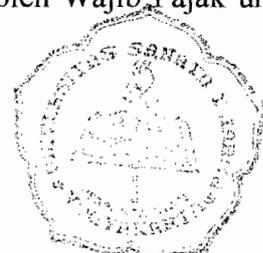
Tarif pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal sebesar 0,5% (lima persepuluh persen)

8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Sesuai dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 bahwa besarnya NJOPTKP ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberi NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. (Mardiasmo, 2003; 272).

9. Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Subjek pajak melakukan pendaftaran dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk



melaporkan data Objek Pajak yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaiannya yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh subjek pajak

- b. Atas dasar SPOP tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yaitu surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak. SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data Objek Pajak yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemungkinan dapat terjadi, Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi demikian Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP ini dikeluarkan dalam hal (Waluyo & Wirawan, 2000;419) :

- 1) SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

10. Telaah Penelitian Terdahulu

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan juga pembiayaan pembangunan sudah diserahkan kepada Pemerintah

Daerah sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk berusaha meningkatkan sumber pendapatannya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang masih tergolong kecil. Hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Ngada menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi yang sangat kecil dengan rata-rata 0,68% sehingga belum dapat diandalkan sebagai sumber Pendapatan Daerah. (Veronika Stefania Wua, 2002: 66). Sedangkan adanya perubahan Undang-undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan belum dapat merubah peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah, suatu studi pustaka yang dilakukan pada tahun 2000 menyatakan tidak ada perubahan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan baik menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1994 maupun Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 2000 serta proses penghitungan pajak terutang menghasilkan pajak terutang yang lebih tinggi daripada Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, hal ini tetap menyulitkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. (A.N Independensiyati, 2000:70). Penelitian lain mengenai elastisitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PDRB yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2002 menunjukkan bahwa elastisitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PDRB bersifat inelastis yang berarti apabila PDRB dan jumlah rumah tangga berubah 1% dan faktor-faktor lain dianggap tetap maka Pajak Bumi dan Bangunan akan mengalami penurunan sebesar 0,25% dan 0,72% (Maria Magdalena Sribegjani, 2002:68).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyatakan rumusan hipotesis sebagai berikut :” terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Otonomi Daerah dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama Otonomi Daerah.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus yaitu jenis penelitian terhadap suatu obyek tertentu dalam pemerintahan Kabupaten Sleman, adapun hasil yang diperoleh dari analisa hanya berlaku untuk obyek tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi : Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman.

Waktu : Penelitian dilakukan dari tanggal 20 November 2003 sampai tanggal 20 Februari 2004.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.

Adapun obyek yang akan diteliti adalah data Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002.

D. Data Yang Dicari :

- a Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b Data Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 sampai 2003

- c Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 1995/1996 sampai 2002.
- d Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

E. Teknik Pengumpulan Data

a Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai pegawai yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

b Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara melihat data yang akan diteliti.

c. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

F. Teknik Analisa Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif.

a. Permasalahan Pertama

Untuk menyelesaikan permasalahan pertama ditempuh beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

- 1) Melihat besarnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan Daerah dengan formula :

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Tabel yang digunakan adalah :

Tabel 3.1

Rencana Contoh Tabel untuk Analisis Peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran (a)	Realisasi PBB (b)	Pendapatan Daerah (c)	Kontribusi (%) (b/c)
Rata-rata			

Data yang dibutuhkan :

1. data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan realisasinya tahun anggaran 1995/1996 sampai 2002.
 2. data Pendapatan Daerah tahun anggaran 1995/1996 sampai 2002.
- 2) Setelah memperoleh prosentase kontribusi PBB kemudian dibandingkan dengan rasio standar yang dikemukakan oleh W.A Lewis, yaitu bahwa rasio pajak terhadap Pendapatan

Daerah minimal sebesar 18% untuk dapat diandalkan dalam membiayai pembangunan daerah.

b. Permasalahan kedua

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan teknik komparatif, yaitu dengan membandingkan antara rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum dan selama Otonomi Daerah, sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Otonomi Daerah dan selama Otonomi Daerah.

Karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini kurang dari 30 dengan tingkat kepercayaan 5%, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Membuat hipotesa nol (H_0) dan hipotesa alternatif (H_A)

$$H_0: \mu_A = \mu_B$$

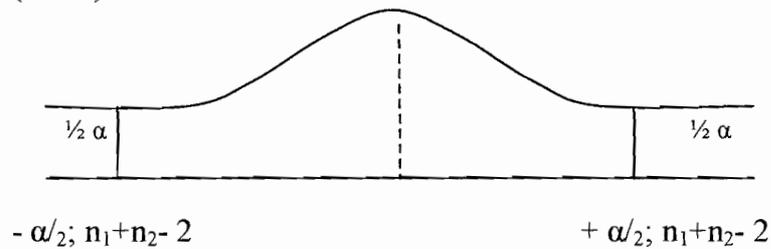
$$H_A: \mu_A \neq \mu_B$$

H_0 = rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Otonomi Daerah sama dengan rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama Otonomi Daerah.

H_A = rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Otonomi Daerah tidak sama dengan rata-rata

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama Otonomi Daerah.

- b. Menentukan daerah kritis pada tingkat kepercayaan tertentu (1-5%)



H_0 diterima jika $-\alpha/2; n_1+n_2- 2 \leq t_c \leq +\alpha/2; n_1+n_2- 2$

H_0 ditolak jika $t_c < -\alpha/2; n_1+n_2- 2$ atau $t_c > +\alpha/2; n_1+n_2- 2$

- c. Menentukan daerah kritis penerimaan H_0 dan penolakan H_0

$$t_c = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{(n_A - 1)S_A^2 + (n_B - 1)S_B^2}{n_A + n_B - 2} \left(\sqrt{\frac{1}{n_A}} + \sqrt{\frac{1}{n_B}} \right)}}$$

- d. Mencari standar deviasi dengan menggunakan rumus :

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

\bar{X}_A = rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Otonomi Daerah

\bar{X}_B = rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama Otonomi Daerah

n_A = jumlah sampel sebelum Otonomi Daerah

n_B = jumlah sampel selama Otonomi Daerah

S_A = deviasi standar sebelum Otonomi Daerah

S_B = deviasi standar selama Otonomi Daerah

- e. Membuat keputusan apakah menerima atau menolak H_0 . Apabila dari perhitungan t_c terletak pada daerah penolakan maka H_0 ditolak dan apabila dari perhitungan t_c terletak pada daerah penerimaan maka H_0 diterima.

- f. Membuat kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu apabila H_0 ditolak maka terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Otonomi Daerah dengan rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama Otonomi Daerah. Apabila H_0 diterima, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Otonomi Daerah dengan rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama Otonomi Daerah.

- c. Permasalahan Ketiga

Untuk menjawab permasalahan kedua, penulis menggunakan teknik analisis efisiensi dan efektivitas dengan formula :

$$1) \text{ Efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi PBB}} \times 100\%$$

Efisiensi (daya guna) digunakan untuk mengukur bagian dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk menutup biaya memungut Pajak Bumi dan Bangunan.

Biaya pemungutan PBB timbul dari adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk Kantor Pos atau badan-badan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak, misalnya biaya untuk menggaji karyawan yang melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menentukan efisien tidaknya pemungutan PBB, penulis membandingkan angka ratio yang diperoleh dengan standar ratio pemungutan pajak untuk Kabupaten yaitu sebesar 7,2 % dari realisasi (Veronika Stefania Wua, 2002 : 31). Cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

- a. Apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar rasio sebesar 7,2 % dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PBB efisien.
- b. Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio sebesar 7,2 % dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PBB kurang efisien.

$$2) \text{ Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan PBB dan potensi hasil PBB. Untuk menentukan efektif tidaknya pemungutan PBB, penulis menggunakan asumsi yang dikemukakan oleh Anthony, Dearden, dan Bedford sebagai berikut (Veronika Stefania Wua, 2002 : 32) :

- a. Apabila kontribusi keluaran (realisasi PBB) yang dihasilkan semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PBB), maka dapat dikatakan pemungutan PBB semakin efektif.
- b. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PBB) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PBB), maka dapat dikatakan pemungutan PBB kurang efektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Lokasi dan Luas Wilayah

Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu dari lima kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, letaknya sangat strategis pada persimpangan menuju ke arah Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Kabupaten Sleman terletak kurang lebih sepuluh kilometer dari pusat ibukota Propinsi. Daerah ini mudah dijangkau karena banyak angkutan umum baik darat maupun udara.

Secara administrasi kabupaten Sleman berbatasan dengan kabupaten lain. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bantul, sedang sebelah barat berbatasan dengan Kulon Progo.

Kabupaten Sleman dibagi menjadi tiga wilayah Pembantu Bupati, yaitu wilayah Pembantu Bupati Timur yang terdiri dari enam kecamatan, yaitu : kecamatan Prambanan, Kalasan, Berbah, Depok, Ngemplak, dan kecamatan Cangkringan. Wilayah Pembantu Bupati Tengah yang terdiri dari enam kecamatan pula yaitu : kecamatan Mlati, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, dan kecamatan Ngaglik. Wilayah Pembantu Bupati Barat meliputi lima kecamatan : kecamatan Moyudan, Godean, Minggir, Seyegan, dan kecamatan Gamping.

Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 547,82 Km² dan beriklim tropis . Musim hujan jatuh antara bulan November-April, sedang musim kemarau atau musim kering jatuh pada bulan Mei-Oktober. Dari luas wilayah tadi dapat dimanfaatkan untuk :

1. sawah	: 242,9 Km ²	(42,26%)
2. tanah tegalan	: 58,64 Km ²	(10,2%)
3. tanah pekarangan	: 18,88 Km ²	(32,51%)
4. hutan rakyat dan hutan negara	: 29,45 Km ²	(5,13%)
5. kolam	: 1,78 Km ²	(0,31%)
6. lain-lain	: 55,11 Km ²	(9,59%)

Keadaan tanah di daerah kabupaten Sleman adalah : di bagian selatan datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara kecamatan Prambanan dan sebagian di kecamatan Gamping. Kemudian makin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng Merapi relatif terjal dan terdapat banyak mata air. Di daerah ini terdapat empat macam jenis tanah yang terbentuk merupakan interaksi unsur-unsur pembentuk tanah. Keempat jenis tanah tersebut adalah :

1. Litosol	: 2,317 Ha	(4,03%)
2. Regosol	: 49,586 Ha	(86,23%)
3. Grumosol	: 1,746 Ha	(3,04%)
4. Mediteran	: 3,851 Ha	(6,70%)

Ketinggian tanah Kabupaten Sleman dapat di bagi menjadi dua kelas, yaitu ketinggian lebih dari 100-500 meter dan lebih 500-2500 dari permukaan air laut.

Ketinggian lebih dari 500-2500 meter dari permukaan air laut seluas 16.030 Ha atau 27,89% dari luas wilayah, terdapat di kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Seyegan, Gamping, dan Berbah. Sedang ketinggian lebih dari 100-500 meter dari permukaan air laut seluas 41.452 Ha atau 72,11% dari luas wilayah meliputi kecamatan Tempel, Mlati, Sleman, Turi, Pakem, Ngaglik, Prambanan, Ngemplak, dan Cangkringan. Mengenai geologi kabupaten Sleman dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu endapan vulkanik, sedimen dan vulkanik serta batuan terobosan. Endapan vulkanik merupakan endapan vulkanik Merapi Muda dan endapan vulkanik tua berupa tuf, abu, breksi, anglomerat, dan lelehan lava tak terpisahkan. Endapan vulkanik Merapi ini terdapat di semua kecamatan, luas endapan vulkanik keseluruhan 53.799 Ha (93,59% dari luas wilayah). Paling luas ada di kecamatan Cangkringan dengan luas 4.774 Ha, sedang paling sempit ada di kecamatan Prambanan seluas 1.340 Ha.

Sedimen dan vulkanik merupakan formasi batu gamping dan batu pasir napalan, terdapat di tujuh kecamatan yaitu : Godean, Moyudan, Minggir, Seyegan, Prambanan, Pakem, dan Cangkringan. Luas wilayah sedimen dan vulkanik keseluruhan 3.662 Ha (6,30% dari luas wilayah). Paling luas terdapat di kecamatan Prambanan dengan luas 2,795 Ha, sedang tersempit di kecamatan Minggir seluas 5 Ha.

Batuan terobosan berupa diorit yang membentuk bukit di daerah Godean, Moyudan, dan Seyegan. Luas seluruhnya 62 Ha (0,11% dari luas wilayah).

Paling luas di wilayah Godean dengan luas 35 Ha dan yang sempit di kecamatan Moyudan seluas 10 Ha.

B. Penduduk

Penduduk di Kabupaten Sleman pada akhir tahun 1999 keseluruhan berjumlah 838.618 jiwa terdiri dari 414.158 jiwa laki-laki dan 424.460 jiwa perempuan. Penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan daya dukung lingkungan yang kurang seimbang. Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Sleman mencapai 1.458 orang/Km². Menurut catatan kependudukan yang tertinggi terdapat di kecamatan Depok yaitu 3.002 orang/Km². Sedang terendah terdapat di kecamatan Cangkringan yaitu 544 orang/Km².

Penduduk Sleman yang berusia sepuluh tahun keatas terserap disektor :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Pertanian | : 27,15 % |
| 2. Pertambangan dan penggalian | : 1,34 % |
| 3. Industri pengolahan | : 13,93 % |
| 4. Listrik, gas, dan air bersih | : 38,50 % |
| 5. Bangunan | : 23,44 % |
| 6. Angkutan dan komunikasi | : 1,05 % |
| 7. Jasa | : 21,19 % |

(Sumber : Dinas Kependudukan & Sipil Kantor Statistik tahun 2000)

Adapun komposisi penduduk menurut Kantor Statistik, Kabupaten Sleman mempunyai penduduk dengan struktur umur muda dibawah umur lima belas

tahun adalah 222.297 jiwa (26,84%), untuk umur 15-64 tahun (golongan umur potensial kerja) adalah 545.823 jiwa (65,84%). Di wilayah Kabupaten Sleman usia muda berjumlah 84.856 jiwa, golongan kuat kerja 390.317 jiwa dan golongan usia lanjut 56.156 jiwa.

C. Pendidikan

Pada tahun 1999/2000, fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Sleman dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sekolah Negeri :

a. Taman Kanak-kanak	: 3
b. Sekolah Dasar	: 446
c. Sekolah Lanjutan Pertama	: 54
d. Sekolah Menengah Umum	: 17
e. Sekolah Menengah Kejuruan	: 17

2. Sekolah Swasta :

a. Taman Kanak-kanak	: 437
b. Sekolah Dasar	: 101
c. Sekolah Lanjutan Pertama	: 61
d. Sekolah Menengah Umum	: 36
e. Sekolah Menengah Kejuruan	: 41

Adapun jumlah siswa seluruh untuk tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah 103.638 orang, sedang yang belajar di sekolah swasta berjumlah 44.042 orang.

Kabupaten Sleman mempunyai fasilitas pendidikan baik swasta maupun negeri. Adapun pendidikan tinggi negeri yang telah berdiri sampai tahun 2000 antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan beberapa program Diploma. Sedang untuk perguruan tinggi swasta di daerah Sleman cukup banyak jumlahnya, antara lain adalah Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, dan lain-lain.

D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk dari data pokok pembangunan Sleman yang diterbitkan oleh BAPPEDA Sleman tahun 1998, tercatat petani sejumlah 181.718 orang, industri/usaha 2.596 orang, pengrajin industri kecil 21.561 orang, buruh tani 26.313 orang, buruh industri 19.553 orang, buruh bangunan 23.276 orang, pertambangan 1.603 orang, perdagangan 25.490 orang, pengangkutan 6.816 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 37.969 orang, ABRI 7.580 orang, dan pensiunan 11.893 orang.

E. Agama dan Kepercayaan

Kabupaten Sleman pada akhir tahun 1999 dengan jumlah penduduk seluruhnya 838.618 jiwa, yang beragama Islam 755.704 orang (91,28%), Katholik 27.914 orang (6,15%), Kristen dan Protestan 19.859 orang (2,40%), Hindu 964 orang (0,11%), dan Budha 506 orang (0,06%).

Meskipun sebagian besar penduduk Kabupaten Sleman memeluk agama Islam, namun sebagian orang Jawa ataupun masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan kadang-kadang secara penuh tidak dapat meninggalkan kepercayaan warisan dari para leluhurnya. Apabila kita cermati masih ada sisa-sisa kepercayaan warisan leluhur belum hilang sama sekali, karena pada umumnya mereka telah menghayati. Masyarakat Sleman masih percaya adanya alam gaib, hal ini terjadi karena pengaruh dari keadaan atau lingkungannya pada saat itu.

F. Sleman Sebagai Proyek Percontohan Otonomi Daerah

Pada tahun 1994, Sleman dijadikan salah satu dari 26 Daerah Tingkat II sebagai Pelaksana Proyek Percontohan Otonomi Daerah yang titik beratnya di daerah tingkat II. Penetapan itu tertuang pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.105 tanggal 3 tahun 1994. Adapun Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Sleman selama menjalankan Proyek Percontohan Otonomi Daerah sebagai berikut :

Tahun	Target APBD Setelah Perubahan	Realisasi APBD
1995-1996	Rp 42.613.869.411,00	Rp 31.175.567.807,00
1996-1997	Rp 72.251.239.833,00	Rp 71.245.963.589,00
1997-1998	Rp 85.569.920.032,00	Rp 89.793.768.700,00
1998-1999	Rp 95.502.556.169,00	Rp 99.158.592.683,00
1999-2000	Rp 141.596.699.572,00	Rp 141.596.967.572,00

Sementara itu sumber Penerimaan Keuangan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah selama lima tahun (1995 - 2000) adalah sebagai berikut :

Sumber	Milyar	%
PAD	Rp 66.920,00	15,88
Bagi Hasil Pajak (BHP)	Rp 30.879,00	7,33
Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP)	Rp 1.290,00	0,30
Subsidi	Rp 254.986,00	60,52
Bantuan	Rp 77.224,00	18,33
Jumlah	Rp 421.299,00	100

Dari data di atas tampak bahwa Sleman masih sangat tergantung pada subsidi dan bantuan (78,58%), sedangkan sumber penerimaan keuangan berkisar antara 12% sampai 22%. Jadi meskipun Sleman dijadikan Proyek Percontohan Otonomi Daerah tetapi ternyata masih tergantung pada subsidi dan bantuan sebanyak 78,85%. Hasil yang dicatat oleh Pemerintah Sleman dalam Percontohan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman tahun 1995-2000 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat lebih lancar, mudah, dan cepat.
2. Meningkatnya ketertiban masyarakat dan swasta dalam kegiatan.
3. Pembangunan daerah, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan kegiatan pembangunan daerah.
4. Memberi kemudahan kepada Bupati dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

5. Masyarakat lebih memilih kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
6. Memberikan motivasi kerja dan tantangan bagi aparat di lingkungan Kabupaten Sleman untuk mengembangkan wawasan serta kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya.

G. Logo “Sleman Sembada”

Sleman Sembada merupakan logo Kabupaten Sleman untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan yang optimal. Slogan tersebut telah memiliki kekuatan hukum, yakni dengan dikeluarkannya Perda No.4 tahun 1992 tentang slogan gerakan desa terpadu Sleman Sembada.

Adapun makna slogan “Sleman Sembada” tidak lain mengandung pengertian, sikap dan prilaku yang bertanggung jawab, pantang mundur, kerja keras dan yakin akan jati dirinya. Sembada diartikan sebagai :

- S : Sehat
- E : Elok dan Edi
- M : Makmur dan Merata
- B : Bersih dan Berbudaya
- A : Aman dan Adil
- D : Damai dan Dinamis
- A : Agamis

Dengan dihayati dan diterapkan slogan Sleman Sembada dalam kehidupan masyarakat diharapkan :

1. Dapat mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan baru.
2. Membudayakan dan memasyarakatkan hidup bersih dan sehat.
3. Memberikan motivasi kepada masyarakat.
4. Membangkitkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan Sleman yang bersih dan indah.

BAB V

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Sebagai wujud desentralisasi khususnya di era Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman dituntut dapat menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) menguraikan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan pengeluaran pada sektor-sektor yang telah ditetapkan. Salah satu sumbangan bagi Pendapatan Daerah yang selama ini dinilai cukup memberikan kontribusi adalah Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PBB sebagai salah satu penerimaan pajak dari Dana Perimbangan dinilai dapat memberikan kontribusi yang berarti karena menurut perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah, 90% (sembilan puluh persen) penerimaan PBB diserahkan pada Pemerintah Kabupaten.

A. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di kabupaten Sleman

Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya untuk meningkatkan kegiatan pemungutan pajak khususnya PBB dengan tetap mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat mengetahui besarnya peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah dilakukan perbandingan antara realisasi penerimaan PBB terhadap

Pendapatan Daerah yang dicerminkan dalam Realisasi Pendapatan Daerah.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$C_n = \frac{P_x n}{P_y n} \times 100\%$$

dimana :

C_n = kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah

P_x = penerimaan/realisasi PBB

P_y = pendapatan daerah

n = tahun tertentu

1. Peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman sebelum Otonomi Daerah

a. Analisa Data

Tabel 5.1 di bawah ini menjelaskan peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah sebelum Otonomi Daerah

Tabel 5.1

Peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun Anggaran (a)	Realisasi PBB (Rp) (b)	Pendapatan Daerah (Rp) (c)	Kontribusi (%) (b/c)
1995/1996	3.112.345.127,00	32.795.128.549,36	9,50
1996/1997	4.876.694.892,00	72.061.104.085,85	6,77
1997/1998	4.968.369.009,00	90.241.670.203,13	5,51
1998/1999	6.227.708.141,00	96.078.477.422,55	6,48
1999/2000	6.555.028.662,00	126.237.003.093,84	5,20
Rata-rata			6,69

Sumber : BPKKD Kab. Sleman

Dari Tabel 5.1 dapat diketahui peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah terbesar adalah pada tahun anggaran 1995/1996, yaitu sebesar 9,50% dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 32.795.128.549,36. Sedangkan peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah terkecil adalah pada tahun anggaran 1997/1998, yaitu sebesar 5,51% dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 90.241.670.203,13

Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah sebelum Otonomi Daerah sebesar 6,69% setiap tahunnya.

b. Pembahasan

Dari hasil analisa di atas dapat diketahui peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 9,50% dapat dikatakan cukup tinggi, karena besarnya Pendapatan Daerah diimbangi dengan penerimaan PBB yang tinggi pula.

Pada tahun anggaran berikutnya, yaitu 1996/1997, PBB hanya memberikan kontribusi sebesar 6,77%. Turun 2,73% dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini timbul karena adanya peningkatan Pendapatan Daerah yang tidak sebanding dengan realisasi penerimaan PBB.

Pada tahun anggaran 1997/1998, kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah turun lagi menjadi 5,51%. Peningkatan penerimaan PBB hanya terjadi di daerah tertentu yang mengalami peningkatan jumlah Objek Pajak. Daerah-daerah yang mengalami peningkatan Objek Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Tlogoadi, dengan peningkatan jumlah Objek Pajak sebanyak 40 orang.
- 2) Harjobinangun, dengan peningkatan jumlah Objek Pajak sebanyak 64 orang.
- 3) Pakembinangun, dengan peningkatan jumlah Objek Pajak sebanyak 210 orang.
- 4) Candibinangun, dengan peningkatan jumlah Objek Pajak sebanyak 118 orang.
- 5) Sidorejo, dengan peningkatan jumlah Objek Pajak sebanyak 130 orang.
- 6) Nogotirto, dengan peningkatan jumlah Objek Pajak sebanyak 261 orang.
- 7) Caturtunggal, dengan peningkatan jumlah Objek Pajak sebanyak 47 orang.

Untuk daerah-daerah yang lain tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengalami penurunan.

Baru pada tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun anggaran 1998/1999 kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah naik 0,97% menjadi 6,48%. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman. Jika jumlah Objek Pajak tahun anggaran sebelumnya sebesar 427.872 orang, untuk tahun anggaran 1998/1999 meningkat menjadi 447.206 orang.



Tetapi pada tahun anggaran 1999/2000 kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah turun lagi sebesar 1,28%, menjadi 5,20%. Penurunan penerimaan PBB ini terjadi karena adanya tunggakan pajak, seperti yang terjadi di daerah Bokoharjo dimana jumlah Objek Pajak meningkat menjadi 113 orang tetapi penerimaan pajaknya turun sebesar Rp 2.309.816,00 Selain itu pada tahun anggaran 1999/2000 banyak terjadi penurunan jumlah objek pajak, seperti yang terjadi di daerah Sumberharjo, Wukirharjo, Hargobinangun, Girikerto, Donokerto, Sumberejo, dan Mororejo.

Secara keseluruhan, peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah cukup mengkhawatirkan karena kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah tiap tahun anggaran selalu turun bahkan selama 5 tahun anggaran tersebut belum terjadi peningkatan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah. Rata-rata kontribusi yang diberikan PBB terhadap Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 adalah sebesar 6,69%. Dengan demikian, PBB yang dipungut di Kabupaten Sleman sebelum otonomi mempunyai kontribusi yang sangat kecil. Apabila dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh W.A Lewiss bahwa rasio pajak minimal sebesar 18% terhadap Pendapatan Daerah (Veronika Stefania Wua, 2002:77), maka dapat disimpulkan bahwa PBB belum dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman pada masa sebelum Otonomi Daerah.

2. Peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman selama Otonomi Daerah

a. Analisa Data

Tabel 5.2 berikut ini menjelaskan peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman selama tiga periode pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu tahun anggaran 2000, 2001, dan 2002.

Tabel 5.2

Peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 – 2002

Tahun Anggaran (a)	Realisasi PBB (Rp) (b)	Pendapatan Daerah (Rp) (c)	Kontribusi (%) (b/c)
2000	7.237.880.325,63	128.171.610.615,94	5,65
2001	10.293.807.142,00	308.531.284.637,09	3,34
2002	12.231.666.356,00	383.092.723.289,42	3,20
Rata-rata			4,06

Sumber : BPKKD Kab. Sleman

Dari Tabel 5.2 di atas dapat diketahui kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah tertinggi adalah pada tahun anggaran 2000, dimana realisasi PBB sebesar Rp 7.237.880.325,63 dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 128.171.610.615,94.

Sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun anggaran 2002 dimana PBB hanya memberikan kontribusi sebesar 3,20% terhadap Pendapatan Daerah.

b. Pembahasan

Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2000 sebesar 5,65% dan merupakan kontribusi PBB tertinggi selama

tiga tahun pelaksanaan Otonomi Daerah. Meskipun begitu, jika dilihat besarnya realisasi PBB secara keseluruhan selama pelaksanaan Otonomi Daerah, pada tahun anggaran 2000 ini penerimaan PBB nilainya paling kecil. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2000 banyak daerah mengalami penurunan pembayaran PBB, daerah-daerah itu adalah sebagai berikut:

- 1) Widodomartani, PBB yang dihasilkan hanya sebesar Rp 28.022.403,00. Padahal tahun anggaran sebelumnya mampu menghasilkan PBB sebesar Rp 28.124.107,00 dengan jumlah objek pajak meningkat sebesar 243 orang. Hal ini mengindikasikan adanya tunggakan pajak.
- 2) Sindumartani, memberikan kontribusi PBB sebesar Rp 17.340.790,00. Tahun anggaran sebelumnya mampu memberi kontribusi sebesar Rp 17.444.078,00 tetapi penurunan ini dikarenakan adanya penurunan jumlah objek pajak.
- 3) Glagaharjo, memberikan hasil pembayaran PBB sebesar Rp 6.305.692,00. Tahun anggaran sebelumnya daerah ini memberikan hasil pembayaran PBB sebesar Rp 6.756.631,00. Padahal di daerah ini jumlah Objek Pajak meningkat sebesar 77 orang. Hal ini berarti di daerah Glagaharjo ada tunggakan pajak yang belum dilunasi.

- 4) Wukirsari, dengan kontribusi PBB sebesar Rp 43.689.407,00 dengan jumlah Objek Pajak meningkat sebesar 144 orang dan ini berarti terdapat tunggakan pajak lagi dari daerah Wukirsari.
- 5) Harjobinangun, memberikan kontribusi PBB sebesar Rp 23.271.180,00 dengan jumlah Objek Pajak meningkat sebesar 119 orang.
- 6) Girikerto dengan kontribusi PBB sebesar Rp 40.496.710,00 dan jumlah Objek Pajak yang meningkat dari tahun anggaran sebelumnya, memberi tunggakan pajak kembali bagi penerimaan PBB.

Selain yang disebutkan di atas, masih banyak lagi daerah yang mengindikasikan tunggakan pajak, seperti Bangunkerto, Donokerto, Pondokrejo, Sumberrejo, Mororejo, Banyurejo, Tambakrejo, Lumbungrejo, dan Merdikorejo.

Pada tahun anggaran 2001, kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah turun walaupun secara nominal realisasi PBB meningkat. Tetapi peningkatan PBB tersebut tidak sebanding dengan peningkatan Pendapatan Daerah, sehingga tetap saja membuat kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah kecil.

Untuk tahun anggaran 2002, kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah semakin turun. Padahal jika dilihat, realisasi PBB meningkat pada tiap daerahnya meskipun ada juga daerah yang turun pembayaran pajaknya. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Cangkringan, dimana

jumlah Objek Pajak turun sebanyak 211 orang, jumlah pembayaran pajak untuk daerah Kepuharjo turun sebanyak Rp 21.315.815,00 dan meningkat sebesar Rp 44.784.577,00 untuk daerah Wukirsari.

Secara keseluruhan, kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah sebesar 4,06%. Hal ini berarti bahwa PBB belum dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman.

B. Uji Hipotesa Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Sebelum dan Selama Otonomi Daerah.

Tabel 5.3

**Realisasi PBB Sebelum dan Selama Otonomi Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000 dan
Tahun Anggaran 2000 –2002**

Tahun Anggaran	Realisasi PBB Sebelum Otonomi Daerah (Rp) (A)	Tahun Anggaran	Realisasi PBB Selama Otonomi Daerah (Rp) (B)
1995/1996	3.112.345.127,00	2000	7.237.880.325,63
1996/1997	4.876.694.892,00	2001	10.293.807.142,00
1997/1998	4.968.369.009,00	2002	12.231.666.356,00
1998/1999	6.227.708.141,00		
1999/2000	6.555.028.662,00		
Jumlah	25.740.145.831,00	Jumlah	29.863.353.823,63

Sumber: BPKKD Kab. Sleman.

Keterangan:

$$\bar{X}_A = 5.148.029.166,2$$

$$\bar{X}_B = 9.921.117.941,21$$

1. Hipotesa nol (H_0) dan hipotesa alternatif (H_A)

H_0 = tidak ada perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum otonomi daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama otonomi daerah.

$$(\mu_A = \mu_B).$$

H_A = ada perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum otonomi daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama otonomi daerah. ($\mu_A \neq \mu_B$).

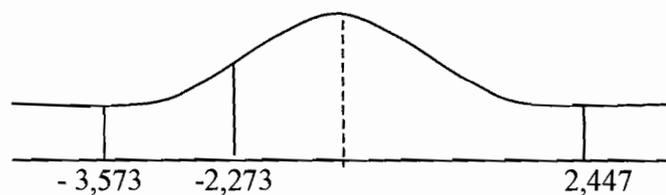
2. Menentukan *Level of Significant*

$$(\alpha) : 0,05$$

$$\text{d.f} : (5 + 3) - 2 = 6$$

$$t : 2,447$$

3. Daerah Kritis Penerimaan



H_0 diterima apabila : $-2,447 < t \text{ hitung} < 2,447$

H_0 ditolak apabila : $t \text{ hitung} < -2,447$ atau $t \text{ hitung} > 2,447$

4. Menentukan Standar Deviasi

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$S_A = \sqrt{\frac{7.395.263.837.701.029.886,8}{4}}$$

$$S_A = \sqrt{9.244.079.797.126.287.358,5}$$

$$S_A = 3.040.407.834$$

$$S_B = \sqrt{\frac{12.677.295.319.137.514.686,10}{2}}$$

$$S_B = \sqrt{6.338.647.659.568.757.343,05}$$

$$S_B = 2.517.667.107$$

5. Perhitungan nilai t_c :

$$t_c = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{(n_A - 1)S_A^2 + (n_B - 1)S_B^2}{n_A + n_B - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}}$$

$$t_c = \frac{5.148.029.166,2 - 9.921.117.941,21}{\sqrt{\frac{(5-1)(3.040.407.834)^2 + (3-1)(2.517.667.107)^2}{5+3-2}} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{3}}}$$

$$t_c = \frac{-4.773.088.775,01}{\sqrt{\frac{36.976.319.188.194.286.224 + 12.677.295.323.339.498.898}{6}} \sqrt{\frac{8}{15}}}$$

$$t_c = \frac{-4.773.088.775,01}{\sqrt{\frac{49.653.614.511.533.785.122}{6}} \sqrt{\frac{8}{15}}}$$

$$t_c = \frac{-4.773.088.775,01}{\sqrt{8.275.602.418.588.964.187} \sqrt{0,53}}$$

$$t_c = \frac{-4.773.088.775,01}{2.876.734.680 \times 0,73}$$

$$t_c = \frac{-4.773.088.775,01}{2.100.016.316,4}$$

$$t_c = -3,573$$

Hasil ini juga telah diuji dengan menggunakan SPSS dan hasilnya sama.

6. Kesimpulan

Ho diterima apabila : $-2,447 < -3,573 < 2,447$

Ho ditolak apabila : $-3,573 < -2,447$ atau $-3,573 > 2,447$

Oleh karena $-3,573 < -2,447$ maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum otonomi daerah dan rata-rata pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan selama otonomi daerah.

C. Analisa Efisiensi dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan

1. Analisa Efisiensi

Analisa ini digunakan untuk mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan yang bersangkutan.

Efisiensi PBB dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi PBB}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur efisiensi pemungutan PBB, penulis membandingkan angka rasio dengan standar rasio untuk biaya pemungutan pajak pada Kabupaten Sleman sebesar 7,20% dari realisasi.

Cara pengukurannya adalah :

- a) Apabila biaya pemungutan masih di bawah standar ratio sebesar 7,20% dari realisasi maka dapat dikatakan pemungutan PBB efisien.

b) Apabila biaya pemungutan melebihi standar rasio sebesar 7,20% dari realisasi maka dapat dikatakan biaya pemungutan PBB tidak/kurang efisien.

a. Analisa Efisiensi Pemungutan PBB sebelum Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman.

1). Analisa Data

Untuk mengetahui efisiensi PBB sebelum Otonomi Daerah dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.4

**Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 1995/1996 – 2002**

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
1995/1996	90.258.008,68	3.112.345.127,00	2,92
1996/1997	119.479.024,90	4.876.694.892,00	2,45
1997/1998	123.215.551,40	4.968.369.009,00	2,48
1998/1999	214.233.160,10	6.227.708.141,00	3,44
1999/2000	157.661.534,20	6.555.028.662,00	2,40
Rata-rata			2,74

Sumber : BPKKD Kab. Sleman

Tabel menunjukkan bahwa :

Pada tahun anggaran 1995/1996 sampai tahun anggaran 2002 pemungutan PBB dinilai efisien karena tingkat efisiensi di bawah 7,20%. Rata-rata efisiensi pada 5 tahun anggaran sebelum Otonomi Daerah sebesar 2,74%. Dari angka tersebut, pemungutan PBB di Kabupaten Sleman dapat dikatakan efisien.

2) Pembahasan

Tingkat efisiensi pemungutan PBB pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 2,92% dan menurut standar rasio yang berlaku untuk pemungutan PBB di Kabupaten Sleman, pemungutan tersebut efisien karena kurang dari 7,20%. Pada tahun anggaran ini, biaya pemungutan PBB masih rendah karena kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih cukup baik sehingga pemerintah tidak mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak ke daerah-daerah.

Untuk tahun anggaran 1996/1997, tingkat efisiensi pemungutan PBB meningkat meskipun biaya pemungutan PBB lebih besar dari tahun anggaran sebelumnya tetapi karena realisasi PBB juga meningkat, maka pemungutan PBB tetap efisien. Bahkan dapat dikatakan lebih efisien dari tahun anggaran sebelumnya. Besarnya biaya pemungutan PBB ini karena mulai terjadi penunggakan pajak di daerah-daerah tertentu seperti di Wukirharjo, Gayamharjo, Sambirejo, Umbulharjo, Kepuharjo, dan Glagaharjo.

Pada tahun anggaran 1997/1998, biaya pemungutan PBB meningkat sebesar Rp 123.215.551,4 tetapi terjadi peningkatan realisasi PBB juga, menjadi Rp 4.968.369.009,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 2,48%, maka pemungutan PBB berjalan efisien. Biaya pemungutan PBB terlihat dalam tabel selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan pihak Pemerintah Kabupaten Sleman

banyak melakukan penyuluhan mengenai PBB ke daerah-daerah khususnya daerah yang memiliki tunggakan pajak tertinggi.

Untuk tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun anggaran 1998/1999, tingkat efisiensi pemungutan PBB menurun. Hal ini terjadi karena besarnya biaya pemungutan meningkat dengan pesat sementara realisasi PBB meningkat tetapi tidak sebanding dengan biaya pemungutannya. Meningkatnya biaya pemungutan ini karena untuk tahun anggaran 1998/1999, pemerintah masih giat melakukan penyuluhan pajak. Hasilnya dapat dilihat secara langsung, realisasi PBB sebesar Rp 6.227.708.141,00. Lebih Besar dari target PBB yang besarnya hanya Rp 4.979.017.380,00

Pada tahun anggaran 1999/2000, biaya pemungutan PBB dapat ditekan serendah mungkin menjadi Rp 157.661.534,20 dengan realisasi PBB sebesar Rp 6.555.028.662,00 dan tingkat efisiensi sebesar 2,40%, maka dapat dikatakan pemungutan PBB untuk tahun anggaran 1999/2000 berjalan dengan efisien.

Secara keseluruhan, pemungutan PBB di Kabupaten Sleman pada masa sebelum Otonomi Daerah berjalan dengan efisien karena rata-rata efisien sebesar 2,74%, lebih kecil dari ratio yang berlaku untuk pemungutan PBB di Kabupaten Sleman.

b. Analisa Efisiensi Pemungutan PBB selama Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman.

1). Analisa Data

Tabel 5.4 di bawah ini menggambarkan tingkat efisiensi pemungutan PBB di Kabupaten Sleman selama tiga tahun pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 5.5

**Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2000 – 2002**

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
2000	206.316.297,10	7.237.880.325,63	2,85
2001	287.422.309,40	10.764.880.500,00	2,67
2002	334.137.485,20	12.019.334.000,00	2,78
Rata-rata			2,76

Sumber : BPKKD Kab. Sleman

Dari Tabel 5.4 di atas dapat dilihat pemungutan PBB paling efisien adalah pada tahun anggaran 2001, yaitu sebesar 2,67% dengan biaya pemungutan sebesar Rp 287.422.309,4 dan realisasi PBB sebesar Rp 7.237.880.325,63. Sedangkan pemungutan PBB yang tidak efisien terjadi pada tahun anggaran 2000, dengan biaya pemungutan sebesar Rp 206.316.297,40 dan realisasi PBB sebesar Rp 7.237.880.325,63.

2. Pembahasan

Selama pelaksanaan Otonomi Daerah biaya pemungutan PBB selalu meningkat karena semakin banyak daerah yang memiliki

tunggakan pajak, hal ini diikuti pula dengan peningkatan realisasi PBB sehingga tingkat efisiensi pemungutan PBB meningkat pula. Kalau hal ini dibiarkan berlanjut, akan terjadi pemungutan PBB yang berjalan dengan tidak efisien karena standar yang digunakan untuk pemungutan PBB adalah sebesar 7,20%. Jadi jika tingkat efisiensi semakin mendekati 7,20%, dapat dikatakan pemungutan PBB semakin tidak efisien. Seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2000, dengan tingkat efisiensi sebesar 2,85% merupakan tingkat efisiensi pemungutan PBB tertinggi yang berarti pemungutan PBB pada tahun anggaran tersebut tidak efisien. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya tunggakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak sehingga pemerintah harus melakukan usaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara penyuluhan pada Wajib Pajak dan Aparat Perpajakan serta program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Untuk tahun anggaran 2001, tingkat efisiensi pemungutan pajak kembali meningkat menjadi sebesar 2,67%. Meskipun berjalan dengan efisien dan terjadi peningkatan realisasi PBB namun diikuti pula peningkatan biaya pemungutannya. Hal ini mengindikasikan masih adanya tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak.

Biaya pemungutan untuk tahun anggaran 2002 meningkat lebih besar dari tahun anggaran sebelumnya karena pemerintah harus

meningkatkan penerimaan pajak dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi pajak ke daerah-daerah yang memiliki tunggakan pajak seperti ke daerah Madurejo, Bokoharjo, Gayamharjo, Sambirejo, Kalitirto, Tegaltirto, Jogotirto, Selomartani, Tamanmartani, Purwomartani, Sariharjo, Widodomartani, Bimomartani, Kecamatan Cangkringan, Hargobinangun, Banyurejo, Tambakrejo, Lumbungrejo, Margorejo, Margodadi, Sidomoyo, Sidorejo, Sidoluhur, Sidoagung, Balecat, Trihanggo, Sumberagung, Sendangagung, Sendangmulyo, Sendangrejo, dan Sendangsari. Total ada 35 daerah yang memiliki tunggakan pajak.

Secara keseluruhan, pemungutan PBB selama Otonomi Daerah telah berjalan dengan efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 2,74%.

2. Analisa Efektivitas Pemungutan PBB di Kabupaten Sleman

Analisa ini digunakan untuk mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi/target pajak dengan anggapan semua Wajib Pajak membayar pajaknya. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran (realisasi) dengan sasaran yang harus dicapai (target).

Untuk mengetahui efektivitas digunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Asumsi yang digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu pusat pertanggungjawaban adalah (Veronika Stefania Wua, 2002 : 85) :

- a) Semakin besarnya kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PBB) terhadap pencapaian sasaran tersebut (target PBB), maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut.
- b) Semakin kecil kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PBB) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PBB), maka dapat dikatakan unit tersebut tidak/kurang efektif.

a. Analisa Efektivitas pemungutan PBB di Kabupaten Sleman sebelum Otonomi Daerah.

1). Analisa Data

Secara jelas, efektivitas PBB di tunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.6

**Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000**

Tahun Anggaran	Realisasi PBB (Rp)	Target PBB (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)
1995/1996	3.112.345.127,00	2.957.043.000,00	1,05
1996/1997	4.876.694.892,00	3.974.103.000,00	1,22
1997/1998	4.968.369.009,00	5.064.372.072,00	0,98
1998/1999	6.227.708.141,00	4.979.017.380,00	1,25
1999/2000	6.555.028.662,00	4.979.017.380,00	1,31
Rata-rata	5.148.029.166,20	4.390.710.566,40	1,16

Sumber : BPKKD Kab. Sleman

Dari Tabel 5.5 di atas dapat diketahui tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun anggaran 1999/2000 dengan tingkat efektivitas sebesar 1,31% dan tingkat efektivitas terendah ada pada tahun anggaran 1997/1998 dengan tingkat efektivitas sebesar 0,98%.

2). Pembahasan

Pada tahun anggaran 1995/1996 pemungutan PBB di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan efektif karena realisasi PBB lebih tinggi dari target yang diinginkan. Namun bukan berarti kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga tinggi karena masih ada tunggakan pajak di tahun anggaran ini. Realisasi yang ada seharusnya dapat lebih tinggi lagi jika dilihat dari besarnya jumlah objek pajak.

Untuk tahun anggaran 1996/1997 pemungutan PBB dikatakan efektif karena realisasinya lebih besar dari target yang ada meskipun hanya memiliki selisih yang kecil, yaitu sebesar Rp 902.591.891,00.

Pada tahun anggaran 1997/1998, pemungutan PBB berjalan tidak efektif karena realisasi PBB lebih kecil dari target. Masih ada target yang belum dipenuhi sebesar Rp 96.003.063,00 dan ini berarti ada tunggakan pajak. Pemungutan pajak yang tidak efektif ini jelas merugikan pemerintah.

Pemungutan PBB untuk tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun 1998/1999 telah kembali berjalan efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 1,25%. Hal ini berarti usaha pemerintah dengan cara penyuluhan pajak ke daerah-daerah sedikit memberikan hasil yang baik meskipun masih ada daerah yang memiliki tunggakan pajak.

Tingkat efektivitas pemungutan pajak di tahun anggaran 1999/2000 meningkat menjadi 1,63% karena realisasi PBB lebih besar dari target, sementara pemerintah tidak meningkatkan target PBB.

Kebijaksanaan untuk tidak meningkatkan target PBB ini diambil karena diperkirakan pada tahun anggaran ini akan terjadi penunggakan pajak yang lebih besar dari sebelumnya. Tetapi ternyata tunggakan pajak tidak sebanyak yang diperkirakan, hanya di Sumberharjo, Wukirharjo, Hargobinangun, Girikerto, Bangunkerto, Donokerto, Sumberejo, Mororejo, dan Tambakrejo yang memiliki tunggakan pajak.

Secara keseluruhan, pemungutan pajak di Kabupaten Sleman sebelum Otonomi Daerah telah berjalan efektif. Rata-rata realisasi PBB lebih besar dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Analisa Efektivitas Pemungutan PBB di Kabupaten Sleman selama otonomi daerah.

1). Analisa Data

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan PBB di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2002.

Tabel 5.7

**Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2000 – 2002**

Tahun Anggaran	Realisasi PBB (Rp)	Target PBB (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)
2000	7.237.880.325,63	4.428.694.782,00	1,63
2001	10.293.807.142,00	8.904.445.344,00	1,15
2002	12.231.666.356,00	8.900.000.000,00	1,37
Rata-rata	9.921.117.941,21	7.411.046.708,70	1,38

Sumber : BPKKD Kab. Sleman

Dari Tabel 5.6 di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas tertinggi adalah pada tahun anggaran 2000 dengan tingkat efektivitas sebesar 1,63%. Sedangkan tingkat efektivitas terendah adalah pada tahun anggaran 2001 dengan tingkat efektivitas sebesar 1,15%. Secara keseluruhan rata-rata realisasi PBB lebih besar dari target yang diharapkan, ini berarti pemungutan PBB selama tiga periode pelaksanaan Otonomi Daerah berjalan efektif.

2). Pembahasan

Untuk tahun anggaran 2000, tingkat efektivitas pemungutan PBB sebesar 1,63% dan merupakan tingkat efektivitas tertinggi selama pelaksanaan otonomi. Hal ini terjadi karena pada tahun anggaran 2000 ini terjadi penurunan tunggakan pajak.

Pada tahun anggaran 2001, tingkat efektivitas pemungutan pajak turun menjadi 1,15%. Hal ini dipengaruhi adanya peningkatan tunggakan pajak di banyak daerah di Kabupaten Sleman. Tunggakan pajak ini sebesar 49% dari total penerimaan PBB Kabupaten Sleman.

Tingkat efektivitas pemungutan PBB untuk tahun anggaran 2002 kembali meningkat menjadi 1,37% dari tahun anggaran sebelumnya. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan realisasi PBB tetapi masih ada objek pajak yang tidak memenuhi kewajiban

membayar pajak sehingga penunggakan pajak tetap terjadi pada tahun anggaran ini.

Secara keseluruhan, tingkat efektivitas pemungutan PBB di Kabupaten Sleman sebesar 1,38%. Jadi pemungutan PBB di Kabupaten Sleman selama 3 tahun pelaksanaan Otonomi Daerah dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Terjadinya penunggakan pajak yang terjadi di setiap tahun anggaran disebabkan karena :

- a. Terjadinya penetapan ganda atas objek pajak yang sama.
- b. Ada Wajib Pajak yang tidak jelas domisilinya walaupun objek pajaknya ada.
- c. Objek pajak tidak ada.
- d. Setelah adanya pembetulan atas keberatan oleh Wajib Pajak dalam bentuk SPPT, tidak diikuti dengan perbaikan/pengurangan terhadap target yang telah ditetapkan dalam DKPH oleh KP PBB Kabupaten Sleman.
- e. Setelah adanya perbaikan/penghapusan untuk tahun yang bersangkutan namun untuk tahun berikutnya muncul lagi penetapan yang sama.

Untuk mengatasi adanya tunggakan yang mencapai hampir 50% dari target, pemerintah perlu melihat kembali semua tahap administrasi penerimaan pajak antara lain (Veronika Stefania Wua, 2002 : 89) :

a. Menentukan Wajib Pajak

Haruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi Wajib Pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengaitkan identitas dengan sumber-sumber investasi lain misalnya Daftar Balik Nama Tanah dapat digunakan untuk menentukan Wajib Pajak Tanah atau melakukan pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak.

b. Menentukan nilai pajak terutang

Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat dan ini melibatkan Wajib Pajak dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan tarif pajak yang benar.

c. Prosedur pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut potongan benar-benar dilakukan dan masuk kedalam rekening pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 1995/1996 sampai tahun anggaran 1999/2000 masih sangat kecil, yaitu dengan rata-rata sebesar 6,69% per tahun. Hal ini berarti bahwa penerimaan PBB belum dapat diandalkan dalam pembiayaan Pembangunan Daerah pada masa sebelum otonomi. Sedangkan peranan PBB terhadap Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2002 hanya memiliki rata-rata sebesar 4,06% per tahun, hal ini juga berarti penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan belum dapat diandalkan untuk membiayai Pembangunan Daerah.
2. Ada perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Otonomi Daerah dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman.
3. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman dapat dikatakan berjalan efektif dan efisien baik sebelum maupun selama Otonomi Daerah karena kontribusi keluaran (realisasi PBB) lebih besar dari pencapaian sasaran (target PBB).

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada sebagian data yang diperlukan oleh penulis tetapi tidak ada dalam arsip Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman. Data tersebut adalah Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2001, data mengenai jumlah subjek PBB tahun anggaran 1995/1996. Selain itu pada tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 belum ada sistem komputerisasi dalam penyusunan administrasi sehingga menyulitkan pengumpulan data pada tahun-tahun anggaran tersebut. Kesulitan lain yang dihadapi penulis adalah waktu penelitian yang diberikan terlalu singkat sehingga untuk data Pendapatan Daerah tahun anggaran 2003 tidak dapat diperoleh karena data baru keluar setelah penelitian berakhir. Hal ini menyebabkan periode penelitian selama Otonomi Daerah hanya 3 tahun saja, padahal rencana semula adalah selama 4 tahun pelaksanaan Otonomi Daerah.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian di Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman, penulis akan memberikan saran dan masukan yang sekiranya nanti dapat berguna untuk perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman. Saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan, aparat Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah dituntut untuk

dapat mengembangkan administrasi dan operasional secara operasional dan optimal dengan memperhatikan faktor-faktor kecepatan pelayanan, keamanan, kemudahan, serta kepuasan wajib pajak.

2. Mengingat masyarakat sebagai Wajib Pajak cukup penting peranannya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pajak, maka kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara rutin, meluas, dan merata. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, maupun media televisi.
3. Pemerintah Daerah dalam memprediksikan Pendapatan Daerah untuk tahun-tahun yang akan datang sebaiknya jangan hanya berdasarkan Kebijakan Bupati yang sudah berlaku saja, tetapi hendaknya juga berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sendiri, sehingga dalam penyusunan anggarannya akan tercapai ketepatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep, Adya Barata, 1991. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung :
CV.Armico
- Goedhart, C, 1979. *Garis-Garis Besar Keuangan Negara*. (Ratmoko,
penerjemah). Jakarta : Penerbit Djambatan
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-16/PJ6/1998 tentang PBB
- Krustanto, C, 2003. *Hutan Berbasis Kemasyarakatan (Solusi Alternatif
Dalam Otonomi Daerah)*. www.google.com
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai
Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan PBB
- Rimsky K Judisseno. 1997. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta :
PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudjana, 2000. *Metoda Statistika*. Bandung: Penerbit Tarsito
- Undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Waluyo & Wirawan, 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wua, Veronika Stefania, 2002. *Peranan Pajak Bumi dan Bangunan
Terhadap Pendapatan Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma

Lampiran

**REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DATI II SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 1995/1996 S/D 1998/1999**

NO.	JENIS	1995/1996		1996/1997		1997/1998		1998/1999		Ke 1
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	POS SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU	1.283.723.341.37	1.283.723.341.37	840.085.701.11	840.085.701.11	762.212.735.56	762.212.735.56	472.277.552.47	472.277.552.47	
	Jumlah Pos 1.1	1.283.723.341.37	1.283.723.341.37	840.085.701.11	840.085.701.11	762.212.735.56	762.212.735.56	472.277.552.47	472.277.552.47	
1	POS PAJAK DAERAH									
303	Pajak Potong Hewan	5.800.000.00	5.801.200.00	5.800.000.00	5.804.800.00	6.200.000.00	6.259.400.00	971.400.00	971.400.00	
304	Pajak Pembangunan I	2.107.500.000.00	2.064.040.603.75	3.000.000.000.00	2.262.767.117.00	3.835.000.000.00	3.090.316.479.08	3.417.065.000.00	3.052.842.437.63	
005	Pajak Radio	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.000.00	9.675.600.00	583.200.00	583.200.00	
306	Pajak Bangsa Asing	600.000.00	652.000.00	5.500.000.00	5.553.750.00	8.400.000.00	7.412.500.00	1.672.500.00	1.672.500.00	
008	Pajak Tontonan	115.000.000.00	135.965.203.00	150.000.000.00	150.465.200.75	185.000.000.00	162.873.826.00	107.849.451.00	117.276.928.00	
009	Pajak Reklame	25.000.000.00	28.145.078.00	110.000.000.00	113.360.027.60	265.000.000.00	265.026.444.80	318.000.000.00	309.498.507.20	
013	Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	30.000.000.00	29.877.300.00	30.000.000.00	23.670.800.00	33.000.000.00	17.027.650.00	57.000.00	57.000.00	
016	Pajak Penerangan Jalan	1.500.000.000.00	1.680.137.635.00	2.500.000.000.00	2.340.456.980.00	2.640.000.000.00	2.747.465.560.00	3.100.000.000.00	3.282.901.725.00	
037	Pajak Galian & olahan Gol.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	1.729.267.00	
038	Pajak ABT & Air Pemuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.662.918.50	460.728.852.00	
036	Pajak Pemberian Pas Hewan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
069	Denda Pajak	1.000.000.00	5.413.971.50	1.500.000.00	2.209.186.78	2.000.000.00	1.007.524.94	2.000.000.00	920.892.04	
	Jumlah	3.784.900.000.00	3.950.032.991.25	5.802.800.000.00	4.904.287.863.05	7.124.600.000.00	6.307.064.984.82	7.667.861.469.50	7.229.182.708.87	
	POS RETRIBUSI DAERAH									
	Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00	0.00	114.000.000.00	114.200.350.00	116.900.000.00	101.002.400.00	
075	Leges	184.500.000.00	36.707.900.00	188.910.000.00	142.876.500.00	190.240.000.00	177.045.700.00	26.121.900.00	30.492.700.00	
076	Dispensasi Jalan	30.500.000.00	30.500.441.00	35.000.000.00	33.000.000.00	40.000.000.00	37.159.209.00	1.891.000.00	2.141.000.00	
077	Pemeriksaan Pembantaian	17.400.000.00	17.946.300.00	17.400.000.00	17.402.000.00	18.600.000.00	18.898.925.00	15.630.000.00	15.630.500.00	
080	Sempadan/ijin Bangunan	600.000.000.00	576.056.595.00	600.000.000.00	484.719.835.00	600.000.000.00	391.696.010.00	310.000.000.00	353.257.470.00	
082	Ijin Perusahaan Kecil	70.000.000.00	76.375.600.00	100.000.000.00	104.201.000.00	125.000.000.00	125.173.700.00	125.000.000.00	128.774.500.00	
087	RSU/Balai Pengobatan	586.000.000.00	637.371.470.00	750.000.000.00	763.698.900.00	1.425.000.000.00	1.398.701.775.00	1.740.650.000.00	1.744.228.661.00	
091	Obyek Wisata	140.000.000.00	131.484.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092	Ret. Reklame	48.000.000.00	51.875.345.00	80.000.000.00	80.583.070.00	116.000.000.00	116.000.000.00	13.538.085.00	13.538.085.00	
093	Pasar	475.000.000.00	492.676.505.00	665.000.000.00	666.064.565.00	825.000.000.00	811.107.695.00	866.000.000.00	879.890.085.00	
094	Pemeriksaan Susu	0.00	0.00	2.700.000.00	2.706.300.00	3.000.000.00	3.033.875.00	469.025.00	469.025.00	
097	Bea Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
098	Pemeriksaan Hewan di Pasar	3.000.000.00	3.000.150.00	3.000.000.00	3.002.300.00	3.000.000.00	3.003.550.00	451.950.00	451.950.00	
100	Hasil Kartu Ternak	8.250.000.00	8.262.000.00	8.250.000.00	8.254.800.00	8.350.000.00	8.350.800.00	0.00	0.00	
102	TPR/Non Bonus	36.000.000.00	36.055.800.00	0.00	0.00	96.500.000.00	97.254.700.00	96.500.000.00	110.640.400.00	
103	Bea Parkir	245.000.000.00	238.322.290.00	280.000.000.00	213.458.450.00	275.000.000.00	144.940.806.00	93.295.480.00	85.709.105.00	
104	Pemberian Pas Hewan	4.000.000.00	4.004.450.00	4.000.000.00	4.002.400.00	4.000.000.00	4.006.300.00	603.500.00	603.500.00	
	Jumlah Pos 1.2.2	2.441.650.000.00	2.340.639.446.00	2.734.260.000.00	2.523.970.420.00	3.843.690.000.00	3.450.573.395.00	3.407.050.940.00	3.466.829.646.00	



NO.	JENIS	1995/1996		1996/1997		1997/1998		1998/1999		KET
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
121	POS BAGIAN LABA BUMN									
	Bank Pembangunan Daerah	120.956.282.21	120.956.282.31	257.884.579.33	257.884.569.33	353.000.000.00	342.735.941.57	410.999.000.00	403.122.161.51	
122	PD Air Minum	2.100.000.00	2.100.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	125.000.000.00	105.000.000.00	
123	PD Bank Pasar	100.000.000.00	171.198.140.00	175.000.000.00	303.084.400.00	300.000.000.00	345.293.820.00	345.000.000.00	375.097.390.00	
	Jumlah Pos 1.2.3	223.056.282.21	294.254.422.31	442.884.579.33	570.968.969.33	673.000.000.00	708.029.761.57	880.999.000.00	883.219.551.51	
141	POS PENERIMAAN DINAS 2									
	Penerimaan Sekretariat	145.000.000.00	112.215.750.00	132.500.000.00	144.983.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	Penerimaan DPU (Bina Marga)	90.600.000.00	78.195.500.00	60.000.000.00	64.296.000.00	87.800.000.00	82.334.550.00	53.000.000.00	51.580.100.00	
143	Penerimaan Din. Peternakan	0.00	0.00	76.000.000.00	76.089.000.00	140.000.000.00	141.029.068.00	209.129.000.00	212.649.000.00	
144	Penerimaan Din. Pertanian	15.000.000.00	15.139.250.00	10.050.000.00	10.375.350.00	10.500.000.00	10.512.445.00	11.500.000.00	11.670.000.00	
146	Penerimaan Din. Kesehatan	173.000.000.00	184.113.750.00	195.000.000.00	200.517.850.00	468.000.000.00	462.856.590.00	545.300.000.00	547.182.505.00	
147	Penerimaan Kantor BPN/Dn Kapdkk	46.700.000.00	46.194.350.00	95.500.000.00	97.244.500.00	228.000.000.00	233.668.500.00	241.557.500.00	247.223.250.00	
149	Penerimaan Din. Cipta Karya	0.00	0.00	75.000.000.00	57.035.000.00	105.000.000.00	114.532.000.00	125.000.000.00	138.016.800.00	
150	Penerimaan Din. Pariwisata	0.00	0.00	210.000.000.00	210.175.300.50	397.300.000.00	455.634.960.00	456.000.000.00	463.888.604.05	
151	Penerimaan Din. LLAJ	0.00	0.00	176.393.640.00	175.343.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	Penerimaan Din. Pertambangan	0.00	0.00	750.000.000.00	1.032.622.971.29	1.100.000.000.00	1.133.038.653.79	380.337.081.50	445.737.257.50	
153	Penerimaan Din. Perikanan	0.00	0.00	6.200.000.00	12.420.400.00	8.250.000.00	11.647.500.00	11.500.000.00	14.914.750.00	
154	Penerimaan Din. Perkebunan	0.00	0.00	32.500.000.00	18.220.000.00	33.000.000.00	26.162.200.00	3.000.000.00	3.005.500.00	
	Jumlah Pos 1.2.4	470.300.000.00	435.858.600.00	1.818.143.640.00	2.099.323.521.79	2.577.850.000.00	2.671.416.398.79	2.036.323.581.50	2.136.076.766.55	
181	POS PENDAPATAN LAIN-LAIN									
	Hasil Penjualan Milik Daerah	0.00	0.00	9.734.000.00	9.734.672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	Dana Ex Claim	56.000.000.00	58.397.575.00	59.000.000.00	59.067.930.00	54.000.000.00	55.571.045.00	56.500.000.00	49.416.680.00	
183	Jasa Giro & Bank	70.000.000.00	77.782.028.00	100.000.000.00	52.197.145.00	75.000.000.00	67.622.538.00	75.000.000.00	120.702.710.25	
184	Penerimaan Deviden BPD DIY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	Sumbangan Pihak Ke Tiga (III)	215.000.000.00	66.400.128.80	215.000.000.00	60.290.000.00	75.000.000.00	38.950.000.00	73.000.000.00	73.000.000.00	
186	Macam-macam Penerimaan	175.692.000.00	218.972.267.48	0.00	294.290.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190	Penerimaan Lain-lain	0.00	0.00	262.000.000.00	0.00	402.000.000.00	165.653.166.72	217.773.000.00	827.986.974.82	
	Jumlah Pos 1.2.5	516.692.000.00	421.551.999.28	645.734.000.00	475.672.886.17	327.796.749.72	327.796.749.72	422.273.000.00	1.071.106.365.07	
	Jumlah PAD	7.436.598.282.21	7.442.337.458.84	11.444.822.219.33	10.574.223.660.34	14.825.140.000.00	13.464.881.289.90	14.414.507.991.00	14.786.415.038.00	
	POS BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK									
	Pos Bagi Hasil Pajak	2.957.043.000.00	3.112.345.765.00	3.974.103.000.00	4.876.694.892.00	5.064.372.072.00	4.968.369.009.00	4.979.017.380.00	6.227.708.141.00	
191	Pajak Bumi dan Bangunan (64.8%)	1.574.142.020.00	1.573.246.344.00	1.775.503.445.00	1.773.791.097.00	2.078.566.040.00	2.138.907.669.00	407.669.085.00	407.669.085.00	
192	Bag. Pajak Kendaraan Bermotor	49.355.340.00	49.355.340.00	64.726.920.00	64.726.920.00	79.938.400.00	84.892.800.00	77.734.730.00	77.734.730.00	
193	Penyisihan Penerimaan PBB Tk.I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.000.000.00	865.201.908.00	
194	BPHTB									
	Jumlah Pos 1.3.1	4.580.540.360.00	4.734.947.449.00	5.814.333.365.00	6.715.212.909.00	7.222.876.512.00	7.192.169.478.00	5.784.421.195.00	7.578.313.864.00	

NO.	JENIS	1995/1996		1996/1997		1997/1998		1998/1999		KE
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK									
201	Juran Hasil Hutan	40.000.000.00	50.736.882.15	80.000.000.00	40.711.967.40	80.000.000.00	113.945.557.17	80.000.000.00	99.538.492.08	
203	Sumbangan Deverdikasi Cengkeh	0.00	0.00	25.050.000.00	25.050.000.00	25.050.000.00	27.027.000.00	32.432.400.00	32.432.400.00	
205	Pemberian Hak Atas Hak Pem.	80.000.000.00	86.227.167.00	85.000.000.00	70.393.281.00	85.000.000.00	119.382.806.50	85.000.000.00	59.440.699.00	
206	Komp.Ret.Tmk/ Pen.Ret. kpd Desa	52.843.780.00	52.843.780.00	78.117.100.00	0.00	71.352.216.00	71.352.216.00	26.432.020.00	27.536.520.00	
	Jumlah Pos 1.3.2	172.843.780.00	189.807.829.15	268.167.100.00	136.155.248.40	261.402.216.00	331.707.579.67	223.864.420.00	218.948.111.08	
	POS SUMBANGAN									
211	Ganjaran	260.000.000.00	452.847.000.00	235.500.000.00	248.460.000.00	231.500.000.00	231.500.000.00	279.620.000.00	279.620.000.00	
212	Subsidi Perimb. Keuangan Negara	15.451.223.000.00	5.512.544.381.00	39.077.901.850.00	39.823.672.699.00	44.617.992.000.00	51.349.456.795.00	56.785.460.000.00	58.508.181.565.00	
213	Subsidi Pembiayaan Penyel.SDN	371.001.000.00	371.001.200.00	407.815.800.00	407.816.000.00	456.059.000.00	456.059.000.00	597.399.000.00	597.399.000.00	
214	SBO-RSD Sleman	65.163.000.00	65.163.000.00	249.938.000.00	249.938.000.00	109.766.000.00	109.766.000.00	407.564.000.00	407.564.000.00	
216	Tunj.Kurang Pengh.Aparat Desa	38.034.000.00	26.424.000.00	43.074.000.00	30.114.000.00	153.954.000.00	163.122.000.00	188.922.000.00	188.922.000.00	
217	Subsidi Dati II Daerah Percontohan	0.00	0.00	401.733.100.00	493.130.562.00	401.733.100.00	436.374.732.00	422.486.600.00	437.021.661.00	
218	SBBO Pertanian	92.000.000.00	92.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	SBB-POD	595.127.000.00	360.000.000.00	391.004.000.00	495.661.043.00	345.104.000.00	345.104.000.00	602.871.000.00	602.871.000.00	
220	Sumbangan dari Tingkat I	322.450.285.00	322.450.285.00	205.572.850.00	83.967.100.00	4.725.000.00	4.725.000.00	1.104.500.00	0.00	
	Jumlah Pos 1.4.1	17.194.998.285.00	7.205.429.866.00	41.012.539.600.00	41.832.759.404.00	46.320.833.100.00	53.096.107.527.00	59.305.427.100.00	61.021.579.226.00	
	POS BANTUAN									
222	Bantuan Pembangunan Dati II	7.856.407.000.00	7.947.733.538.00	8.274.445.000.00	8.257.966.961.00	10.872.626.000.00	10.860.983.154.00	10.355.704.000.00	10.304.757.461.00	
223	Bantuan Pembg.Desda Tertinggal	137.721.000.00	137.609.130.00	20.205.000.00	20.205.000.00	40.000.000.00	40.000.000.00	0.00	0.00	
224	Bantuan Pembangunan SD	530.252.000.00	530.223.600.00	572.522.000.00	570.016.510.00	562.366.000.00	562.330.200.00	855.733.000.00	505.994.500.00	
225	Bantuan Pemb.Sarana Kesehatan	322.790.000.00	321.557.000.00	162.761.000.00	162.761.000.00	207.220.000.00	207.220.000.00	293.239.000.00	15.626.000.00	
226	Bantuan PMTAS	311.983.000.00	311.658.250.00	0.00	0.00	320.965.000.00	276.959.000.00	361.171.000.00	192.823.000.00	
227	Bantuan Pembangunan Desa	630.320.000.00	630.320.000.00	636.500.000.00	636.500.000.00	610.600.000.00	610.600.000.00	610.600.000.00	549.540.000.00	
228	Bantuan P3 DT	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.000.00	600.000.000.00	0.00	0.00	
229	SP ABP-YUDP	1.106.693.999.00	1.104.490.726.00	2.024.137.087.00	1.112.725.657.00	2.509.716.460.00	1.821.733.004.00	0.00	0.00	
230	Bantuan Pusat DR ADB 1232 INO	505.872.730.00	496.235.634.00	725.094.340.00	725.086.545.00	122.604.000.00	118.345.968.00	2.677.722.570.00	0.00	
	Jumlah Pos 1.4.2	11.402.039.729.00	11.479.827.878.00	12.415.664.427.00	11.435.261.673.00	15.846.097.460.00	15.098.171.326.00	15.154.169.570.00	11.568.740.961.00	
	BAGIAN PENR. PEMBANGUNAN									
	POS PINJAMAN PEM. DAERAH									
231	Pinjaman dari ADB	459.784.000.00	459.054.727.00	426.139.800.00	477.405.490.00	297.358.000.00	296.420.267.00	0.00	0.00	
	Jumlah Pos 1.5.1	459.784.000.00	459.054.727.00	426.139.800.00	477.405.490.00	297.358.000.00	296.420.267.00	0.00	0.00	

NO.	JENIS	1995/1996		1996/1997		1997/1998		1998/1999		KE
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	POTONGAN BIAYA PUNGUT PBB									
259	Potongan Biaya Pungut PBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	Penerimaan Iuran Dana Hari Tua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Pos 1.5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	REKAB									
	PENDAPATAN ASLI DAERAH									
	Pos 1.2.1 Pajak Daerah	3.784.900.000.00	3.950.032.991.25	5.802.800.000.00	4.904.287.863.05	7.124.600.000.00	6.307.064.984.82	7.667.861.469.50	7.229.182.708.87	
	Pos 1.2.2 Retribusi Daerah	2.441.650.000.00	2.340.639.446.00	2.734.260.000.00	2.523.970.420.00	3.843.690.000.00	3.450.573.395.00	3.407.050.940.00	3.466.829.646.00	
	Pos 1.2.3 Bagian Laba BUMD	223.056.282.21	294.254.422.31	442.884.579.33	570.968.969.33	673.000.000.00	708.029.761.57	880.999.000.00	883.219.551.51	
	Pos 1.2.4 Penerimaan Dinas	470.300.000.00	435.858.600.00	1.819.143.640.00	2.099.323.521.79	2.577.850.000.00	2.671.416.398.79	2.036.323.581.50	2.136.076.766.55	
	Pos 1.2.5 Penerimaan Lain-lain	516.692.000.00	421.551.999.28	645.734.000.00	475.672.886.17	606.000.000.00	327.796.749.72	422.273.000.00	1.071.106.365.07	
	Jumlah APBD	42.530.527.777.58	32.795.128.549.36	72.221.752.212.44	72.061.104.085.85	85.535.920.023.56	90.241.670.203.12	95.805.613.560.47	96.078.477.422.55	
	JUMLAH PADS	7.436.598.282.21	7.442.337.458.84	11.444.822.219.33	10.574.223.660.34	14.825.140.000.00	13.464.881.289.90	14.414.507.991.00	14.786.415.038.00	

**REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000 SAMPAI DENGAN
TAHUN ANGGARAN 2002**

Jenis	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Naik/Turun	
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Yang Lalu	1999/2000	4.363.614.886,31	-	
	2000	5.884.710.954,20	34,86	
	2001	9.506.607.139,32	61,55	
	2002	15.301.664.101,87	60,96	
2. Pendapatan Asli Daerah	1999/2000	17.125.444.712,22	-	
	2000	17.889.883.435,46	4,46	
	2001	29.571.153.214,43	65,30	
	2002	38.908.192.767,97	31,57	
3. Dana Perimbangan Pos Bagi Hasil Pajak	a. PBB	1999/2000	6.555.028.622,00	-
		2000	7.237.880.325,63	10,42
		2001	10.293.807.142,00	42,22
		2002	12.231.666.356,00	18,83
	b. BPHTB	1999/2000	1.515.554.006,00	-
		2000	1.636.371.093,00	7,97
		2001	6.145.299.457,00	275,54
		2002	6.786.708.077,00	10,44
	c. PPh 21	1999/2000	-	-
		2000	-	-
		2001	4.579.810.256,00	-
		2002	6.445.687.310,00	40,74
	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	1999/2000	146.736.388,03	-
		2000	159.686.378,50	8,83
		2001	76.050.709,99	-52,37
		2002	336.375.325,24	342,30
	Pos DAU	1999/2000	94.397.257.431,13	-
		2000	92.957.646.929,00	-1,53
		2001	205.430.376.000,00	120,99
		2002	255.350.000.000,00	24,30
4. Lain-lain Penerimaan yang sah	1999/2000	16.177.932.055,30	-	
	2000	22.715.501.250,00	40,41	
	2001	12.787.026.018,35	-43,71	
	2002	28.921.611.330,00	126,18	
Pendapatan Daerah	1999/2000	126.237.003.093,84	-	
	2000	128.171.610.615,94	1,53	
	2001	308.531.284.637,09	140,72	
	2002	383.092.723.289,42	24,17	

**DAFTAR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 1995/1996 – 1999/2000**

Kecamatan Kelurahan/Desa	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
Madurejo	30.306.535	22.685.649	23.113.438	25.975.889
Bokoharjo	34.010.008	26.404.266	32.136.367	29.826.551
Sumberharjo	23.365.065	19.853.157	27.583.405	28.066.540
Wukirharjo	2.694.129	2.191.150	3.248.636	3.253.562
Gayamharjo	5.052.756	4.752.243	4.766.166	6.571.369
Sambirejo	4.620.177	3.872.014	4.138.271	4.197.893
Kalitirto	25.091.993	24.166.941	42.136.050	40.436.753
Sendangtirto	27.164.857	27.282.254	39.561.836	41.817.891
Tegaltirto	17.656.525	16.291.369	25.596.638	27.432.619
Jogotirto	19.091.993	19.180.736	32.364.307	34.967.126
Selomartani	54.502.060	50.587.974	48.193.518	51.223.582
Tamanmartani	29.147.485	29.629.495	22.829.084	42.811.755
Tirtomartani	21.180.300	28.873.666	38.873.666	45.075.252
Purwomartani	87.290.685	94.485.584	126.451.661	143.731.966
Maguwoharjo	632.345.022	453.851.991	509.455.242	572.518.600
Sinduadi	351.490.317	343.508.483	394.742.573	440.295.079
Sendangadi	135.246.398	129.181.282	162.546.469	154.607.749
Sardonoharjo	38.204.340	37.109.224	62.474.607	96.429.454
Sariharjo	61.933.532	51.147.895	81.753.626	125.543.586
Sinduharjo	80.445.493	82.544.677	87.409.648	146.301.030
Minomartani	19.635.141	19.912.997	26.315.064	33.017.908
Sumberadi	23.187.239	19.881.009	29.209.044	30.494.868
Tlogoadi	19.050.296	18.394.881	25.422.684	26.412.056
Tirtoadi	21.806.498	20.203.536	23.417.546	24.092.251
Umbulmartani	25.957.218	26.667.981	36.587.161	59.574.633
Wedomartani	99.316.076	65.337.578	93.824.392	99.763.618
Widodomartani	22.724.680	17.346.434	25.357.756	28.124.107
Sindumartani	13.779.934	11.192.874	15.252.786	17.444.078
Bimomartani	13.503.822	9.582.271	13.862.271	14.413.907
Umbulharjo	4.161.880	2.481.704	6.281.429	6.967.262
Argomulyo	21.452.574	17.506.810	21.857.262	6.756.631
Kepuharjo	8.510.711	5.322.235	7.259.129	44.872.283
Glagaharjo	4.448.979	3.650.402	6.659.522	23.327.558
Wukirsari	30.719.549	22.510.782	45.386.530	42.980.353
Harjobinangun	17.491.515	15.968.609	22.883.008	23.327.558
Hargobinangun	35.204.157	30.578.836	39.147.630	42.980.353
Pakembinangun	22.482.074	25.608.193	33.603.779	40.161.958
Candibinangun	19.039.232	19.081.016	22.692.314	24.491.713
Girikerto	33.600.326	30.441.108	40.684.188	41.317.242
Bangunkerto	30.484.297	27.689.582	34.137.816	38.382.474
Donokerto	31.448.715	29.565.949	38.859.922	39.488.122
Wonokerto	19.298.237	17.702.996	28.170.194	28.740.022
Pondokrejo	13.080.374	13.190.026	19.453.160	20.938.985
Sumberejo	11.074.199	9.640.846	14.810.330	15.266.420
Mororejo	12.990.513	12.997.053	18.722.522	19.246.461
Banyurejo	20.445.471	19.834.131	23.845.910	26.745.075

Kecamatan Kelurahan/Desa	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
Tambakrejo	14.252.568	13.292.523	15.576.644	16.788.948
Lumbangrejo	17.836.703	15.007.660	21.868.236	24.103.566
Merdikorejo	27.940.318	24.843.751	34.433.961	36.968.063
Margorejo	27.636.293	28.064.699	32.453.800	34.152.368
Caturharjo	60.482.331	46.341.946	58.096.801	58.937.164
Pendowoharjo	48.191.710	46.517.948	64.519.123	64.989.296
Tridadi	34.052.708	32.409.081	45.424.359	56.031.022
Triharjo	101.193.849	68.641.744	104.601.623	83.674.410
Trimulyo	38.394.932	37.665.164	41.203.480	40.870.615
Margokaton	22.890.783	16.900.120	23.951.723	26.650.188
Margodadi	25.209.424	22.932.276	31.547.998	33.528.257
Margoagung	23.498.924	21.964.342	29.645.741	30.597.444
Margomulyo	20.081.097	15.738.153	22.555.368	24.217.258
Margoluwih	28.131.301	21.069.869	31.547.998	30.864.484
Sidomoyo	19.022.196	17.379.202	24.223.180	26.568.236
Sidoarum	50.930.330	57.801.885	83.673.561	92.379.067
Sidokarto	20.100.132	18.207.908	24.933.269	28.579.795
Sidorejo	17.376.402	15.611.297	22.198.745	23.022.308
Sidoluhur	35.095.783	34.602.199	47.089.488	60.806.031
Sidomulyo	19.139.291	17.822.780	24.096.102	25.582.787
Sidoagung	29.040.575	30.818.344	38.252.577	44.285.411
Ambarketawang	80.200.865	65.502.222	93.301.283	106.625.875
Banyuraden	33.890.470	34.764.698	46.151.532	62.648.057
Balecatur	52.074.002	45.064.854	62.416.216	67.435.882
Nogotirto	44.312.762	48.626.966	97.600.720	96.727.165
Trihargo	52.933.441	50.623.335	70.195.827	75.359.690
Sumberagung	30.565.333	25.268.414	36.432.813	40.837.255
Sumberarum	21.685.785	18.850.914	25.177.370	28.155.952
Sumberahayu	22.963.953	12.051.646	17.943.133	18.797.116
Sumbersari	19.688.301	13.962.522	19.983.133	26.567.117
Sendangagung	19.157.974	17.156.538	24.395.879	30.510.028
Sendangmulyo	22.131.642	13.962.522	19.776.063	25.436.636
Sendangarum	15.250.305	13.496.366	17.978.683	20.186.133
Sendangrejo	24.905.672	19.540.344	34.227.297	38.327.836
Sendangsari	18.742.320	13.000.182	18.431.579	23.223.078
Sukoharjo	28.957.364	27.437.715	38.590.933	67.165.583
Donoharjo	26.386.260	29.565.949	34.855.370	34.950.951
Caturtunggal	1.232.873.238	1.239.896.823	1.468.805.915	1.522.063.277
Condong Catur	587.001.030	634.318.220	729.090.903	935.035.590
Jumlah	4.876.694.892	4.968.369.009	6.227.708.141	6.555.028.662

**DAFTAR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2000**

NO.	TEMPAT PEMBAYARAN	KECAMATAN KELURAHAN/DESA	STTS	JUMLAH NOMINAL	SEKTOR
1.	BRI UNIT PRAMBANAN	KEC. PRAMBANAN			
		1. MADUREJO	7.153	27.343.934	Pedesaan
		2. BOKOHARJO	4.554	32.944.342	Perkotaan
		3. SUMBERHARJO	6.961	28.645.233	Pedesaan
		4. WUKIRHARJO	1.257	3.363.419	Pedesaan
		5. GAYAMHARJO	2.568	6.996.038	Pedesaan
		6. SAMBIREJO	3.273	5.074.835	Pedesaan
	Jumlah		25.766	104.367.801	
2.	BRI UNIT BERBAH	KEC. BERBAH			
		1. KALITIRTO	6.825	46.603.383	Perkotaan
		2. SENDANGTIRTO	5.914	42.290.774	Pedesaan
		3. TEGALTIRTO	5.473	27.471.934	Perkotaan
		4. JOGOTIRTO	5.313	35.073.203	Pedesaan
	Jumlah		23.525	151.439.294	
3.	BRI UNIT KALASAN	KEC. KALASAN			
		1. SELOMARTANI	8.499	60.541.720	Pedesaan
		2. TAMANMARTANI	7.933	51.070.299	Pedesaan
		3. TIRTOMARTANI	8.486	63.125.296	Perkotaan
		4. PURWOMARTANI	11.036	171.554.241	Perkotaan
	Jumlah		35.954	346.291.556	
4.	BRI UNIT MAGUWOHARJO	KEC. DEPOK			
		1. MAGUWOHARJO	11.528	943.564.477	Perkotaan
	Jumlah		11.528	943.564.477	
5.	BRI UNIT JOMBOR	KEC. MLATI			
		1. SINDUADI	8.516	674.533.009	Perkotaan
		2. SENDANGADI	5.407	198.656.277	Perkotaan
	Jumlah		13.923	873.189.286	
6.	BRI UNIT NGAGLIK	KEC. NGAGLIK			
		1. SARDONOHARJO	8.841	129.898.807	Perkotaan
		2. SARIHARJO	6.529	302.355.520	Perkotaan
		3. SINDUHARJO	5.912	174.557.266	Perkotaan
		4. MINOMARTANI	3.327	42.069.984	Perkotaan
	Jumlah		24.609	648.881.577	
7.	BRI UNIT MLATI	KEC. MLATI			
		1. SUMBERADI	4.263	36.399.420	Pedesaan
		2. TLOGOADI	4.694	39.996.313	Perkotaan
		3. TIRTOADI	4.289	30.589.570	Pedesaan
	Jumlah		13.246	106.985.303	
8.	BRI UNIT NGEPLAK I	KEC. NGEPLAK			
		1. UMBULMARTANI	4.640	61.905.973	Pedesaan
		2. WEDOMARTANI	11.436	100.342.970	Pedesaan
		3. WIDODOMARTANI	4.819	28.022.403	Perkotaan
	Jumlah		20.895	190.271.346	
9.	BRI UNIT NGEPLAK II	KEC. NGEPLAK			
		1. SINDUMARTANI	3.581	17.340.790	Pedesaan
		2. BIMOMARTANI	4.521	14.770.524	Pedesaan
	Jumlah		8.102	32.111.314	

10. BRI UNIT CANGKRINGAN	KEC. CANGKRINGAN				
		1. UMBULHARJO	2.440	7.080.327	Pedesaan
		2. ARGOMULYO	6.571	22.555.051	Perkotaan
		3. KEPUHARJO	1.713	32.573.691	Pedesaan
		4. GLAGAHARJO	1.973	6.305.692	Pedesaan
		5. WUKIRSARI	7.204	43.689.407	Pedesaan
	Jumlah	19.901	112.204.168		
11. BRI UNIT PAKEM	KEC. PAKEM				
		1. PURWOBINANGUN	6.756	35.897.619	Pedesaan
		2. HARJOBINANGUN	3.422	23.271.180	Pedesaan
		3. HARGOBINANGUN	6.060	43.418.826	Perkotaan
		4. PAKEMBINANGUN	3.198	40.190.332	Perkotaan
		5. CANDIBINANGUN	4.229	24.798.457	Pedesaan
	Jumlah	23.665	167.576.414		
12. BRI UNIT TURI	KEC. TURI				
		1. GIRIKERTO	6.405	40.496.710	Pedesaan
		2. BANGUNKERTO	6.619	35.882.165	Pedesaan
		3. DONOKERTO	6.525	38.543.011	Perkotaan
		4. WONOKERTO	7.138	28.870.445	Pedesaan
	Jumlah	26.687	143.792.331		
13. BRI UNIT TEMPEL I	KEC. TEMPEL				
		1. PONDOKREJO	2.964	20.448.722	Pedesaan
		2. SUMBERREJO	2.919	14.682.723	Pedesaan
		3. MOROREJO	2.689	18.924.771	Pedesaan
		4. BANYUREJO	4.334	25.945.237	Pedesaan
		5. TAMBAKREJO	2.788	16.542.709	Pedesaan
	Jumlah	15.694	96.544.162		
14. BRI UNIT TEMPEL II	KEC. TEMPEL				
		1. LUMBUNGREJO	2.921	23.389.711	Perkotaan
		2. MERDIKOREJO	6.160	36.547.467	Pedesaan
		3. MARGOREJO	5.341	40.829.149	Pedesaan
	Jumlah	14.422	100.766.327		
15. BRI UNIT SLEMAN	KEC. SLEMAN				
		1. CATURHARJO	5.787	87.391.918	Perkotaan
		2. PENDOWOHARJO	5.425	81.177.441	Perkotaan
		3. TRIDADI	5.517	70.886.624	Perkotaan
		4. TRIHARJO	5.665	147.968.352	Perkotaan
		5. TRIMULYO	5.780	41.505.118	Perkotaan
	Jumlah	28.174	428.929.453		
16. BRI UNIT SEYEGAN	KEC. SEYEGAN				
		1. MARGOKATON	4.820	27.036.956	Pedesaan
		2. MARGODADI	5.123	33.708.689	Pedesaan
		3. MARGOAGUNG	5.083	30.256.208	Pedesaan
		4. MARGOMULYO	5.998	24.785.914	Perkotaan
		5. MARGOLUWIH	4.394	31.247.637	Pedesaan
	Jumlah	25.418	177.291.612		
17. BRI UNIT GODEAN	KEC. GODEAN				
		1. SIDOMOYO	4.142	36.483.394	Pedesaan
		2. SIDOARUM	4.751	113.549.125	Perkotaan
		3. SIDOKARTO	3.789	38.500.639	Pedesaan
		4. SIDOREJO	6.344	29.903.773	Pedesaan
		5. SIDOLUHUR	6.261	57.395.637	Perkotaan
		6. SIDOMULYO	4.932	26.211.909	Pedesaan
		7. SIDOAGUNG	4.827	56.790.623	Perkotaan
	Jumlah	35.046	358.835.100		

18.	BRI UNIT GAMPING	KEC. GAMPING			
		1. AMBARKETAWANG	8.619	111.122.508	Perkotaan
		2. BANYURADEN	4.276	68.244.197	Perkotaan
		3. BALECATUR	8.260	94.705.951	Pedesaan
		Jumlah	21.155	274.072.653	
19.	BRI UNIT NOGOTIRTO	KEC. GAMPING			
		1. NOGOTIRTO	5.293	107.917.759	Perkotaan
		2. TRIHANGGO	7.257	112.699.697	Perkotaan
		Jumlah	12.550	220.617.456	
20.	BRI UNIT MOYUDAN	KEC. MOYUDAN			
		1. SUMBERAGUNG	11.813	41.115.505	Perkotaan
		2. SUMBERARUM	6.264	28.020.080	Pedesaan
		3. SUMBERRAHAYU	5.752	19.531.977	Pedesaan
		4. SUMBERSARI	6.814	26.676.235	Pedesaan
		Jumlah	30.643	115.343.797	
21.	BRI UNIT MINGGIR I	KEC. MINGGIR			
		1. SENDANGAGUNG	7.663	29.773.369	Perkotaan
		2. SENDANGMULYO	6.621	24.039.812	Pedesaan
		Jumlah	14.284	53.813.181	
22.	BRI UNIT MINGGIR II	KEC. MINGGIR			
		1. SENDANGARUM	3.049	20.363.716	Pedesaan
		2. SENDANGREJO	7.023	38.197.610	Pedesaan
		3. SENDANGSARI	5.837	23.319.293	Pedesaan
		Jumlah	15.909	81.880.619	
23.	BRI UNIT BESI	KEC. NGAGLIK			
		1. SUKOHARJO	7.030	89.915.259	Pedesaan
		2. DONOHARJO	5.564	52.851.213	Pedesaan
		Jumlah	12.594	142.766.472	
24.	PT BNI 46 CAB UGM BLK SUMUR	KEC. DEPOK			
		1. CATURTUNGGAL	12.423	1.899.116.831	Perkotaan
		Jumlah	12.423	1.899.116.831	
25.	BRI UNIT DEPOK	KEC. DEPOK			
		1. CONDONGCATUR	12.015	1.111.464.095	Perkotaan
		Jumlah	12.015	1.111.464.095	Perkotaan

RINCIAN STTS DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN
PAJAK DAN PEMBAYARAN PBB (DKHP)
TAHUN 2000 PER TEMPAT PEMBAYARAN

Lampiran : Berita Acara Penyerahan
STTS dan DKHP PBB
Tahun : 2000
Nomor : BA- /WPJ.1C/KB.1304/2000

BANK PERSEPSI : BRI CABANG SLEMAN

NO.	TEMPAT PEMBAYARAN	KECAMATAN KELURAHAN/DESA	STTS	DKHP	JUMLAH NOMINAL	SEKTOR
1.	BRI UNIT PRAMBANAN	KEC. PRAMBANAN				
		1. MADUREJO	7.153	1	27.343.934	Pedesaan
		2. BOKOHARJO	4.554	1	32.944.342	Perkotaan
		3. SUMBERHARJO	6.961	1	28.645.233	Pedesaan
		4. WUKIRHARJO	1.257	1	3.363.419	Pedesaan
		5. GAYAMHARJO	2.568	1	6.996.038	Pedesaan
		6. SAMBIREJO	3.273	1	5.074.835	Pedesaan
	Jumlah	25.766	6	104.393.567		
2.	BRI UNIT BERBAH	KEC. BERBAH				
		1. KALITIRTO	6.825	2	46.603.383	Perkotaan
		2. SENDANGTIRTO	5.914	1	42.290.774	Pedesaan
		3. TEGALTIRTO	5.473	1	27.471.934	Perkotaan
		4. JOGOTIRTO	5.313	1	35.073.203	Pedesaan
	Jumlah	23.525	5	151.462.819		
3.	BRI UNIT KALASAN	KEC. KALASAN				
		1. SELOMARTANI	8.499	1	60.541.720	Pedesaan
		2. TAMANMARTANI	7.933	1	51.070.239	Pedesaan
		3. TIRTOMARTANI	8.486	1	63.125.296	Perkotaan
		4. PURWOMARTANI	11.036	1	171.554.241	Perkotaan
	Jumlah	35.954	4	346.291.556		
4.	BRI UNIT MAGUWOHARJO	KEC. DEPOK				
		1. MAGUWOHARJO	11.528	2	943.564.477	Perkotaan
	Jumlah	11.528	2	943.564.477		
5.	BRI UNIT JOMBOR	KEC. MLATI				
		1. SINDUADI	8.516	2	674.533.009	Perkotaan
		2. SENDANGADI	5.407	2	198.656.277	Perkotaan
	Jumlah	13.923	4	873.189.286		
6.	BRI UNIT NGAGLIK	KEC. NGAGLIK				
		1. SARDONOHARJO	8.841	2	129.898.807	Perkotaan
		2. SARIHARJO	6.529	2	302.355.520	Perkotaan
		3. SINDUHARJO	5.912	2	174.557.266	Perkotaan
		4. MINOMARTANI	3.345	2	78.919.472	Perkotaan
	Jumlah	24.816	8	941.338.466		
7.	BRI UNIT MLATI	KEC. MLATI				
		1. SUMBERADI	4.263	2	36.399.420	Pedesaan
		2. TLOGOADI	4.694	2	39.996.313	Perkotaan
		3. TIRTOADI	4.289	1	30.589.570	Pedesaan
	Jumlah	13.246	5	106.985.303		
8.	BRI UNIT NGEMPLAK I	KEC. NGEMPLAK				
		1. UMBULMARTANI	4.640	2	61.905.973	Pedesaan
		2. WEDOMARTANI	11.436	2	100.342.970	Pedesaan
		3. WIDODOMARTANI	4.819	1	28.022.403	Perkotaan
	Jumlah	20.895	5	190.271.346		
9.	BRI UNIT NGEMPLAK II	KEC. NGEMPLAK				
		1. SINDUMARTANI	3.581	1	17.340.790	Pedesaan
		2. BIMOMARTANI	4.521	1	14.770.524	Pedesaan
	Jumlah	8.102	2	32.111.314		
10.	BRI UNIT CANGKRINGAN	KEC. CANGKRINGAN				
		1. UMBULHARJO	2.440	1	7.080.327	Pedesaan
		2. ARGOMULYO	6.571	1	22.555.051	Perkotaan
		3. KEPUHARJO	1.713	1	32.573.691	Pedesaan
		4. GLAGAHARJO	1.973	1	6.305.692	Pedesaan
		5. WUKIRSARI	7.204	1	43.689.407	Pedesaan
	Jumlah	19.901	5	112.204.168		

11. BRI UNIT PAKEM	KEC. PAKEM				
	1. PURWOBINANGUN	6.756	1	35.897.619	Pedesaan
	2. HARJOBINANGUN	3.422	2	23.271.180	Pedesaan
	3. HARGOBINANGUN	6.060	2	43.418.826	Perkotaan
	4. PAKEMBINANGUN	3.198	2	40.190.332	Perkotaan
	5. CANDIBINANGUN	4.229	2	24.798.457	Pedesaan
Jumlah		23.665	9	167.576.414	
12. BRI UNIT TURI	KEC. TURI				
	1. GIRIKERTO	6.405	1	40.496.710	Pedesaan
	2. BANGUNKERTO	6.619	1	35.882.165	Pedesaan
	3. DONOKERTO	6.525	2	38.543.011	Perkotaan
	4. WONOKERTO	7.138	1	28.870.445	Pedesaan
Jumlah		26.687	5	143.792.331	
13. BRI UNIT TEMPEL I	KEC. TEMPEL				
	1. PONDOKREJO	2.964	1	20.448.722	Pedesaan
	2. SUMBERREJO	2.919	1	14.682.723	Pedesaan
	3. MOREJO	2.689	1	18.924.771	Pedesaan
	4. BANYUREJO	4.534	1	25.945.237	Pedesaan
	5. TAMBAKREJO	2.788	1	16.542.709	Pedesaan
Jumlah		15.694	5	96.544.162	
14. BRI UNIT TEMPEL II	KEC. TEMPEL				
	1. LUMBUNGREJO	2.921	1	23.389.711	Perkotaan
	2. MERDIKOREJO	6.160	1	36.547.467	Pedesaan
	3. MARGOREJO	5.341	1	40.829.149	Pedesaan
Jumlah		14.422	3	100.766.327	
15. BRI UNIT SLEMAN	KEC. SLEMAN				
	1. CATURHARJO	5.787	2	87.391.918	Perkotaan
	2. PENDOWOHARJO	5.425	2	81.177.441	Perkotaan
	3. TRIDADI	5.517	2	70.886.624	Perkotaan
	4. TRIHARJO	5.665	2	147.968.352	Perkotaan
	5. TRIMULYO	5.780	1	41.505.118	Perkotaan
Jumlah		28.174	9	428.929.453	
16. BRI UNIT SEYEGAN	KEC. SEYEGAN				
	1. MARGOKATON	4.820	1	27.036.956	Pedesaan
	2. MARGODADI	5.123	1	33.708.689	Pedesaan
	3. MARGOAGUNG	5.083	1	30.256.208	Pedesaan
	4. MARGOMULYO	5.998	1	24.785.914	Perkotaan
	5. MARGOLUWIH	4.394	1	31.247.637	Pedesaan
Jumlah		25.418	5	147.035.404	
17. BRI UNIT GODEAN	KEC. GODEAN				
	1. SIDOMOYO	4.124	2	36.483.394	Pedesaan
	2. SIDOARUM	4.751	2	113.549.125	Perkotaan
	3. SIDOKARTO	3.789	2	38.500.639	Pedesaan
	4. SIDOREJO	6.344	1	29.903.773	Pedesaan
	5. SIDOLUHUR	6.261	1	57.395.637	Perkotaan
	6. SIDOMULYO	4.932	1	26.211.909	Pedesaan
	7. SIDOAGUNG	4.827	2	56.790.623	Perkotaan
Jumlah		35.028	11	358.835.100	
18. BRI UNIT GAMPING	KEC. GAMPING				
	1. AMBARKETAWANG	8.619	2	111.122.508	Perkotaan
	2. BANYURADEN	4.276	2	68.244.197	Perkotaan
	3. BALECATUR	8.260	2	94.705.951	Pedesaan
Jumlah		21.155	6	274.072.656	
19. BRI UNIT NOGOTIRTO	KEC. GAMPING				
	1. NOGOTIRTO	5.293	2	107.917.759	Perkotaan
	2. TRIHANGGO	7.257	2	112.699.697	Perkotaan
Jumlah		12.550	4	220.617.453	
20. BRI UNIT MOYUDAN	KEC. MOYUDAN				
	1. SUMBERAGUNG	11.813	1	41.115.505	Perkotaan
	2. SUMBERARUM	6.264	1	28.020.080	Pedesaan
	3. SUMBERRAHAYU	5.752	1	19.531.977	Pedesaan
	4. SUMBERSARI	6.814	1	26.676.235	Pedesaan
Jumlah		30.643	4	115.343.797	

21. BRI UNIT MINGGIR I	KEC. MINGGIR				
	1. SENDANGAGUNG	7.663	1	29.773.369	Perkotaan
	2. SENDANGMULYO	6.621	1	24.039.812	Pedesaan
	Jumlah	14.284	2	53.813.181	
22. BRI UNIT MINGGIR II	KEC. MINGGIR				
	1. SENDANGARUM	3.049	1	20.363.716	Pedesaan
	2. SENDANGREJO	7.023	1	38.197.610	Pedesaan
	3. SENDANGSARI	5.837	2	23.319.293	Pedesaan
	Jumlah	15.909	4	81.880.619	
23. BRI UNIT BESI	KEC. NGAGLIK				
	1. SUKOHARJO	7.030	2	89.915.259	Pedesaan
	2. DONOHARJO	5.564	1	52.851.213	Pedesaan
	Jumlah	12.594	3	142.766.472	
24. F F BNI 46 CAB UGM BLK SUMUR	KEC. DEPOK				
	1. CATURTUNGGAL	12.423	2	1.899.116831	Perkotaan
	Jumlah	12.423	2	1.899.116831	
25. BRI UNIT DEPOK	KEC. DEPOK				
	1. CONDONGCATUR	12.015	2	1.111.464.095	Perkotaan
	Jumlah	12.015	2	1.111.464.095	

data

	tahun	pbb	jumlah
1	1995	sebelum otda	3112345127,00
2	1996	sebelum otda	4876694892,00
3	1997	sebelum otda	4968396009,00
4	1998	sebelum otda	6227708141,00
5	1999	sebelum otda	6555028662,00
6	2000	setelah otda	7237880325,63
7	2001	setelah otda	10293807142,0
8	2002	setelah otda	12231666356,0

Group Statistics

	PBB	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
JUMLAH	sebelum otda	5	5148034566,2000	1359710827,4037	608081167,9634
	setelah otda	3	9921117941,2100	2517667106,5828	1453575781,7154

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
JUMLAH	Equal variances assumed	1,284	,300	-3,573	6	,012	-4773083375,0100	1335749459,4013	-8041544557,3795	-1504622192,6405
	Equal variances not assumed			-3,029	2,720	,064	-4773083375,0100	1575641221,8590	-10093002662,4295	546835912,4095

αα

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Lestari Andarini
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 8 Juni 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Perum Griyo Rejo Indah Jl. Kenari 179
Mertoyudan, Magelang
No. Telp. : 0293 - 325434

Pendidikan Formal:

- 1) SDN Tidar 1 Magelang - lulus tahun 1993
- 2) SMP Negeri 7 Magelang - lulus tahun 1996
- 3) SMU Negeri 4 Magelang - lulus tahun 1999
- 4) Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma - lulus tahun 2004

